



**EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Peserta PKH Desa Tiumang Kec. Tiumang Kab. Dharmasraya)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S-1)*

*Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

OLEH:

TINA REGINA SARI

1730402080

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BATUSANGKAR

2022 / 1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama TINA REGINA SARI NIM: 1730402080, dengan judul "Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Mbanqayah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tumang, 18 Juni 2021

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Pembimbing


Gamito, SE., M.Si
NIP. 19670219 200501 1 005


Gamito, SE., M.Si
NIP. 19670219 200501 1 005

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bagusangkar




Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh, TINA REGINA SARI, NIM 1730402080, judul skripsi :**“Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Tiumang Kec. Tiumang Kab. Dharmasraya)** telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Sabtu, 12 Februari 2022 dan dinyatakan telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Sarjana Ekonomi (S. E) dalam Ilmu Ekonomi Syariah. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No.	Nama Penguji	Status Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>Gampito,SE.,M.Si</u> NIP. 196702192005011005	Penata Tk.I, III/d		
2	<u>Dr.H.Alimin,Lc.,M.Ag</u> <u>NIP. 19720505200212 1 004</u>	Penata, III/c		
3	Rahmat Firdaus,M.E.Sy NIP. 201801011034	Penata Muda Tk.I,III/b		

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar**

Dr. H. Rizal., M.Ag, CRP

NIP. 19731007 200212 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Tina Regina Sari

Nim : 1730402080

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : “Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tiumang, 18 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Tina Regina Sari
NIM 1730402080

ABSTRAK

TINA REGINA SARI, NIM 1730402080, judul skripsi :**“Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Tiumang Kec. Tiumang Kab. Dharmasraya)”** program strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN) Batusangkar 2021.

Masalah dalam penelitian ini adalah tidak akuratnya data Rumah Tangga Miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Nagari Tiumang. Kondisi tersebut menimbulkan 3 fenomena yang Terjadi di tengah masyarakat, *pertama* Rumah Tangga Miskin yang tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan, *kedua* tidak tepat sasaran dalam pemilihan penerima bantuan Program Keluarga Harapan, *ketiga* terhambatnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam Desa Tiumang Kec. Tiumang Kab. Dharmasraya

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu efektifitas program keluarga harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Tiumang. PKH di Nagari Tiumang terlaksana dari tahun 2016-2020 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Nagari Tiumang belum terlaksana secara efektif. Belum efektifnya program ini dikarenakan masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan peserta PKH selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta PKH menjadi tidak tepat guna sesuai dengan tujuan PKH, sehingga PKH belum dapat mengurangi atau mengentaskan kemiskinan yang ada di Nagari Tiumang, sedangkan ditinjau dari Ekonomi Islam Program keluarga harapan (PKH) dalam pandangan Islam dapat dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam yaitu keadilan ,sejalan dengan teori keadilan di distribusi kekayaan dalam islam, seperti zakat, wakaf dan sedekah dalam islam. tanggung jawab, dan takaful (jaminan sosial). Dalam penerapannya PKH di Nagari Tiuanng kurang terlaksana dengan baik karena adanya kelemahan dari aspek manajemen di Nagari Tiumang.

Kata Kunci : Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH), Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya**”. Selanjutnya shalawat beserta salam dimohonkan kepada Allah SWT semoga selalu tercurah pada junjungan umat, pelita dikala malam dan pelipur lara dikala duka yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai berilmu pengetahuan seperti adanya sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai tanda bukti penyelesaian Strata Satu (S.1) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Dalam membahas dan menyelesaikan skripsi ini penulis menemui berbagai bentuk kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga semua kendala dan kesulitan yang penulis temui tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. H. Rizal. M.Ag., CRP yang selalu memberikan kemudahan dalam hal menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Bapak Gampito, SE., M.Si yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis, sekaligus sebagai pembimbing penulis dengan tanpa mengenal lelah dan letih untuk meluangkan waktunya yang telah bersedia membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Staf akademik yang telah bersedia membantu selama penulis menimba ilmu di IAIN Batusangkar.
5. Bapak Yusril selaku Kapala Jorong Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya

6. Masyarakat Nagari Tiumbang penerima PKH Program Keluarga Harapan yang sudah meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan informasi terkait Program Keluarga Harapan.
7. Terimakasih saya yang Teristimewa Orang tua saya ibu Nuranai dan ayah saya Bapak Jalmiatian yang memberikan saya semangat dan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikf an program Strata Satu (SI) Jurusan Ekonomi Syariah dan serta kakak saya Mutiara dan adik saya Winesra, Reda, Rabil yang telah membantu saya dan memberikan semngat kepada saya.
8. Seluruh rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang terutama kepada Misra, Nefri, Nova, Mulia rahmi dan widia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang. Amiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Tiumbang, 18 Juni 2021

Penulis



Tina Regina Sari
NIM : 1730402080

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	11
F. Definisi Operasional.....	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas	14
2. Tujuan Efektifitas.....	15
3. Indikator Efektifitas	16
4. Ukuran Efektifitas	18
5. Ukuran Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH)	19
6. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).....	20
7. Faktor penghambat keefektifan program keluarga Harapan (PKH)	26
8. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH).....	28

B. Distribusi

1. Pengertian distribusi.....	29
2. Tujuan Distribusi.....	30

3. Jenis-Jenis Distribusi.....	31
4. Penerapan distribusi perdagangan.....	31
5. Bauran Distribusi	32
6. Strategi Distribusi	32
C. Program Keluarga Harapan (PKH)	
1. Pengertian program keluarga harapan (PKH)	33
2. Tujuan program keluarga harapan (PKH).....	34
3. Hak Dan Kewajiban Peserta PKH.....	34
4. Besaran Bantuan.....	37
D. Pengentasan Kemiskinan	
1. Pengertian Kemiskinan Secara Umum	39
2. Pengentasan Kemiskinan dalam Ekonomi Islam	41
E. Penelitian yang Relevan.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C. Instrumen Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
2. Keadaan Demografis Nagari Tiumang	51
3. Visi dan Misi Nagari Tiumang.....	55
4. Gambaran Umum Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH)	

pada Nagari Tiumang.....	56
--------------------------	----

B. Temuan Penelitian

1. Pembahasan.....	58
2. Efektifitas Distribusi Program Keluarga Harapan Pada Nagari Tiumang	58
3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Efektifitas PKH dalam Mengentaskan Kemiskinan di Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya.....	66
4. Faktor-faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) DI Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang	69
5. Pembahasan	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Komponen PKH.....	8
Tabel 1.2 Jumlah Ruman Tangga Miskin dan Jumlah Rumah yang Menerima PKH.....	9
Tabel 2.1 Besaran Bantuan Kompenen PKH.....	43
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	47
Tabel 4.1 Luas Nagari Tiumang.....	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Perjorong Nagari Tiumang.....	51
Tabel 4.3 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Nagari Tiumang.....	52
Tabel 4.5 Tabel Kesejahteraan Keluarga Nagari Tiumang.....	53
Tabel 4.6 Tabel Fasilitas Pendidikan Nagari Tiumang.....	54
Tabel 4.7 Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Menerima PKH Tahun 2017.....	58
Tabel 4.8 Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Menerima PKH Tahun 2018.....	59
Tabel 4.9 Tanggapan Responden terhadap Kualitas Beras.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita luhur dari setiap bangsa. Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terbebas dari belenggu kemiskinan. Dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, tertuang amanat konstitusi bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai Negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Namun krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah menurunkan Indonesia ke dalam kemiskinan yang lebih serius dan berakibat pada penurunan kualitas kehidupan masyarakat seperti rendahnya tingkat kesehatan, penurunan gizi, dan keterbelakangan pendidikan (Jurnal Dialog, 2012 :11).

Kemiskinan merupakan masalah klasik di berbagai Negara berkembang kata miskin diartikan sebagai kondisi tidak tepenuhinya kebutuhan manusia secara material seolah-olah kemiskinan ini sendiri hanya memiliki arti yang terbatas BAPPENAS mendefinisikan miskin sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang. Laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Krisis yang menekankan perekonomian Indonesia pada pertengahan 1997, telah memberi pengaruh yang sangat buruk bagi makro ekonomi secara keseluruhan dan yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk

yang berada didalam kemiskinan dipercayai naik secara drastis (Supratiko,2011 :100).

Kemiskinan juga dapat diartikan yaitu suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi dalam memenuhi satandar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini di tandai dengan rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar, akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi satandar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan (Bhinadi,2017 : 9).

Kondisi politik dan ekonomi dewasa ini telah mendorong para pegawai memberikan perhatiannya terhadap pengembangan kemampuan kerjanya. Dengan adanya inflasi ekonomi, gelombang resesi dan pengurangan dalam alokasi pegawai, nilai efesiensi administrasi telah memberikan pengaruh yang sangat kuat. Pengaruh nilai efesiensi jika dibandingkan nilai-nilai lainnya seperti keadilan sosial, responsivitas politik maka efektifitas pegawai telah mendorong pemahaman yang sangat kompleks, dan bahkan pada motivasi pegawai juga.

Produktifitas menyangkut masalah hasil akhir, yakni seberapa besar hasil akhir yang akan di peroleh dalam produksi. Dalam hal ini tidak terlepas dengan efisiensi dan efektifitas. Bicara tentang produktivitas tidak dapat terlepas dari dua hal tersebut. Efisiensi diukur dengan rasio *output* dan *input*. Atau dengan kata lain mengukur efisiensi memerlukan identifikasi dari hasil kinerja, seperti misalnya jumlah makan siang yang dilayani dalam kafetaria sekolah atau jumlah penangkapan yang dilakukan oleh petugas polisi dan identifikasi jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tertentu.

Skala produktivitas menjadi tuntutan utama seiring dengan penambahan penduduk, sehingga semakin besar juga kapasitas layanan yang harus diberikan. Organisasi publik harus menanggung resiko luasnya layanan, variasi dan segmentasi layanan publik. Dari sisi lain ukuran oranisasi publik selama ini

menjadi masalah terkait dengan pemenuhan efisiensi struktur yang harus *rightsizing*. Akhirnya teknologi sebagai strategi pamungkas untuk meningkatkan produktivitas layanan ini. Dengan menggunakan alat teknologi, maka pelayanan mudah di jangkau oleh masyarakat, sehingga produktivitas organisasi publik juga meningkat (Ambar Teguh & Rosidah,2018:293).

Indikator efektifitas PKH di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya terdiri dari *input, proses dan output* , maka PKH di Nagari Tiumang di katakan efektif dengan melihat ketiga indikator tersebut. Adapun efisiensi pelaksanaan program di Nagari Tiumang merupakan penilaian berdasarkan seberapa besar penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Dengan kata lain, semakin sedikit sumber daya yang digunakan maka semakin efisien pelaksanaan suatu kebijakan. Pelaksanaan PKH di Nagari Tiumang sumber daya yang di perlukan yaitu sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya fasilitas.

Masalah ekonomi timbul dari adanya keterbatasan sumber ekonomi. Sumber daya tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Sehingga, jika dapat di sederhanakan, maka persoalan ekonomi berawal dari sumber daya yang terbatas (*scarcity*) untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (*need and want*) yang sifatnya tidak terbatas (*unlimited*). Dan krisis ekonomi dan kenaikan bahan bakar (BBM) membuat kehidupan masyarakat Indonesia semakin terpuruk. Banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan program keluarga harapan, yaitu masyarakat yang berpendapatan rendah.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menentaskan kemiskinan dengan salah satu program yang ditunjukan oleh pemerintah untuk menyentuh langsung masyarakat miskin adalah Program Keluarga Harapan yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan secara tunai kepada Rumsh

Tangga Miskin (RTM) yang bertujuan untuk pembangunan milenium dimana didalamnya termasuk pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dan kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa tujuan program ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat dari segala sisi (Tim Nasional Pencepatan pembangunan, 2012).

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, maka pemerintah melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program proteksi sosial, sekaligus sebagai pendukung lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktifitas keluarga miskin. Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH), diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi terkait, mulai dari ditingkat pusat sampai ketingkat daerah (propinsi, kabupaten dan kota), tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan mulai dari perencanaan sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait. Untuk menjamin efektifitas pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan menyalurkan Program keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Masalah utama dalam kehidupan sosial masyarakat adalah cara melakukan pengelokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka tanpa harus bertentangan dengan tujuan makro ekonominya. Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini tidak terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan karena hal itu adalah fakta yang pasti terjadi. Permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat kepada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan, yang kaya

akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan bekerja (Sholahuddin, 2007:198).

Distribusi sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga setiap individu dapat peluang mewujudkan *maslahah* bagi kehidupannya. Pada akhirnya apabila *maslahah* dapat dicapai, maka kehidupan manusia akan bahagia dunia akhirat. Distribusi merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan produksi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan pindah tangan dari satu pihak ke pihak yang lain, mekanisme yang digunakan dalam distribusi adalah dengan cara pertukaran (*mubadalah*) antara produksi lainnya atau antara hasil produksi dengan alat tukar (uang). Dalam syariat Islam bentuk distribusi dikemukakan dalam akad (Rizal & Firdaus, 2013:92).

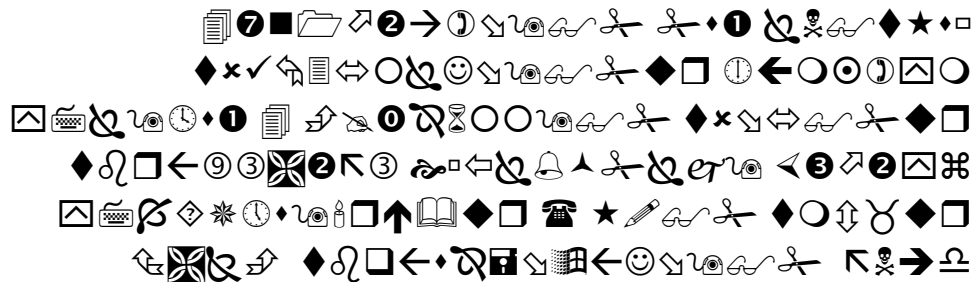
Dalam kehidupan bernegara pemerintah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Berbagai program yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa untuk memperkuat ketahanan rumah tangga terutama rumah tangga miskin dalam memperoleh makanan pokok yaitu beras maka pemerintah mengadakan program Keluarga Harapan untuk Rumah Tangga Miskin. PKH merupakan program untuk menolong masyarakat yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras dan telur untuk kebutuhan rumah tangganya.

Sasaran atau penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Rumah Tangga Miskin (RSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun, ibu hamil, masa nifas dan berada pada lokasi terpilih. Tujuan yang utama adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat miskin.

Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang atau beberapa tempat. Distribusi merupakan distribusi terpenting dalam aktifitas perekonomian, baik distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi maupun sosial. Dalam perspektif makro ekonomi

syariah, distribusi itu dapat di jadikan landasan untuk pertimbangan apakah pembangunan ekonomi sebuah Negara akan melahirkan pemerataan dan keadilan. Distribusi dana PKH di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya ada 25 orang yang menerima dana PKH, dan dapat di ketahui bahwajumlah rumah tangga miskin pemegang Kartu Keluarga Harapan (KKH) yang mendapatkan Program keluarga Harapan sebanyak 25 kepala keluarga.

Islam telah memberikan perintah kepada kita untuk membantu sesama atau fakir miskin, yang terdapat pada surah Ar-Rum : 38



Artinya: Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.

Pada masa Rasulullah SAW juga terdapat beberapa upaya yang dilakukan Rasulullah dengan dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satunya ialah sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Annas bin Malik bahwa suatu ketika ada seorang pengemis dari kalangan Anshar datang meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya kepada pengemis tersebut, “apakah kamu mempunyai sesuatu di rumahmu?” “pengemis itu menjawab,” Tentu, saya mempunyai pakaian yang biasa saya pakai sehari-hari dan sebuah cangkir. “Rasul langsung berkata, “Ambil dan serahkan ke saya!” lalu pengemis itu menyerahkannya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menawarkannya kepada para sahabat, “adakah di antara kalian yang membeli ini?” seorang sahabat menyahut, “saya akan membeli

dengan satu dirham. “rasulullah menawarkannya kemabali, “adakah diantara kalian yang ingin membayaar lebih?” lalu ada seorang sahabat yang sanggup membelinyanya dengan harga dua dirham.

Rasulullah menyuruh pengemis itu membelikan makanan dengan uang tersebut untuk keluarganya, dan selebihnya, Rasulullah menyuruhnya untuk membeli kapak. Rasulullah bersabda, “ Carilah kayu sebanyak mungkin dan juallah, selama dua minggu ini aku tidak ingin melihatmu. “ sambil melepas kepergiannya Rasulullah pun memberinya ongkos . setelah dua minggu pengemis itu datang lagi menghadap Rasulullah sambil membawa uang sepuluh dirham dari hasil menjual kayu. Lalu Rasulullah menyuruhnya membelikan pakaian dan makanan untuk keluarganya, seraya bersada “Hal ini lebih baik bagi kamu, karena meminta-minta hanya akan membuat noda di wajahmu di akhirat nanti. Tidak layak bagi seseorang meminta-minta kecuali dalam tiga hal, fakir miskin yang benar-benar tidak mempunyai sesuatu, utang yang tidak bisa terbayar, dan penyakit yang membuat seseorang tidak bisa berusaha. Kebijakan-kebijakan para pemimpin umat selalu baik dan adil. Tidak seperti kebijakan-kebijakan para pemimpin masa sekarang yang sarat kepentingan dan kekuasaan (Departemen Agama RI,2006).

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak berusia 0 -15 tahun dan ibuk hamil atau nifas dan berada di lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada maka : nenek, tante atau kaka perempuan dapat menerima bantuan. Jadi, pada kartu peserta PKH pun akan tercantum nama ibu atau wanita yang mengerus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil adalah orang yang namanya tercantum di kartu PKH.(Modul Diklat PKH 2013).

Tabel 1.1
Kriteria Komponen PKH

Komponen	Kriteria
Kesehatan	a. Ibu hamil atau menyusui
	b. Anak usia dini (0-6 tahun)
Pendidikan	b. Siswa Sekolah Dasar (SD/MI)
	c. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS)
	d. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)
	e. Anak berusia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
Kesejahteraan Sosial	a. Lanjut usia (lansia) mulai dari 60 tahun
	b. Penyandang disabilitas, terutama disabilitas berat

Sumber : *kemensos RI*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa calon peserta PKH harus memenuhi kriteria yang telah di tentukan oleh Kementrian Sosial. Dengan menggunakan data masyarakat miskin yang dilakukan oleh BPS, kemudian data tersebut di olah dan diseleksi oleh pusat guna memperoleh calon peserta PKH.

Sebelum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat yang tergolong miskin sangat sulit untuk mengakses kesehatan dan pendidikan karena keterbatasan biaya. Rata-rata masyarakat yang tergolong miskin hanya bekerja sebagai buruh tani yang pendapatannya tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan. Dengan adanya PKH ini masyarakat yang tergolong miskin dan menjadi peserta PKH meras terbantu dalam pemenuhan kebutuhan, selain itu untuk akses kesehatan dan pendidikan menjadi lebih mudah.

Di Desa Tiumang adalah desa yang berada di salah satu desa di Kabupaten Dharmasraya Sumatra Barat. Mata pencarian di desa Tiumang rata-rata petani yang hanya mengandalkan perekonomian dengan hasil tani yang tidak menentu. karena rata-rata masyarakat Desa Tiumang hanya berpropesi sebagai tani membuat perekonomian di desa Tiumang tersebut menengah ke bawah, sehingga

layak untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Di Desa Tiumang penerima PKH tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Rumah Tangga Miskin Dan Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Menerima PKH

No	Tahun	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang menerima PKH
1	2016	30	25
2	2017	30	20
3	2018	30	20
4	2019	30	25
5	2020	30	25

Sumber : Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Dharmasraya, 2020

Sedangkan Rumah Tangga Miskin yang mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan) Di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Dharmasraya Pada Tahun 2016-2020 Dari data tersebut di dapatkan oleh Nagari Tiumang dari Kantor Dinas Sosial, dari tabel 1.2 diperoleh Informasi bahwa masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Dharmasraya kurang merata karena pada saat pihak dari kantor Dinas Sosial mengadakan pendataan, banyak masyarakat yang tidak ada di rumah dan mereka malu untuk mengakui membutuhkan Program Keluarga Harapan. Hal ini mengakibatkan Distribusi PKH belum mengakomodir jumlah Rumah Tangga Miskin(RTM) di Nagari Tiumang.

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan dengan mewawancarai (Nuranai) selaku masyarakat Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Dharmasraya, timbul persoalan di tengah masyarakat karena tidak akuratnya data Rumah Tangga Miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Nagari Tiumang. Kondisi tersebut menimbulkan 3 fenomena yang Terjadi di tengah

masyarakat, *pertama* ada Rumah Tangga Miskin Yang tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan, *kedua* tidak tepat sasaran dalam pemilihan penerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut, *ketiga* terhambatnya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya**”.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di persoalkan maka penulis memfokuskan penelitian ini pada efektifitas Program Keluarga Harapan dalam menentaskan kemiskinan ditinjau dari ekonomi islam nagari Tiumang kecamatan tiumang Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan maka, penulis memfokuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis Efektifitas Distribusi Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Dharmasraya.
2. Mengidentifikasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Dharmasraya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka perlu adanya rumusan masalah yang jelas dan terarah, adapun rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektifitas Program Keluarga Harapan Dalam Menentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam Di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya Dari Aspek Tercapainya Tujuan Program?
2. Apa Faktor Penghambat Dan Kelemahan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis Efektifitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam Di Nagari Timang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.
2. Menganalisis Faktor Penghambat Dan Kelemahan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan seluruh efektifitas di nagari pada umumnya dan khususnya masalah Efektifitas Program Keluarga Harapan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya
 - b. Melalui penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti sendiri pada khususnya dan pihak yang berkepentingan pada umumnya baik antara pihak Nagari dengan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi landasan perbijak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan

terhadap distribusi Program Keluarga Harapan yang ada di nagari khususnya di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Dharmasraya agar tidak menyimpang prinsip yang telah ditetapkan.

2. Kegunaan secara praktis

a. Untuk penulis

- 1) Penelitian ini bermamfaat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- 2) Sebagai bahan dasar peneliti tentang Efektifitas Program Keluarga Harapan yang dilakukan di sebuah Nagari

b. Bagi Intansi

- 1) Untuk menambah bahan bacaan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Barusangkar.
- 2) Sebagai bahan dasar penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan efektifitas dan efesiensi Program Keluarga Harapan pada sebuah nagari.

c. Untuk Nagari

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat sebagai masukan bagi wali nagari dan sekaligus segenap pihak-pihak yang khususnya bagi Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Dharmasraya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kensalahan pahaman terhadap pemahaman judul di atas, maka penulis perlu menjeskan istilah sebagai berikut:

Efektifitas adalah hubungan anatara *output* dan tujuan 6T (tepat sasaran penerima mamfaat, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi). Dalam artian efektifitas merupakan ukuran sebera jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.

Disebut efektif apabila tercapai tujuan yang di tentukan 6T (tepat sasaran penerima mamfaat, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi).

PKH dimaksudkan sebagai upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) yang penulis maksud adalah tercapainya pelaksanaan Program Kaeluarga Harapan (PKH) dilihat dari aspek efektifitasnya. Yaitu ukuran keberhasilan pelaksanaan Parogram Keluarga Harapan (PKH) 6T yang meliputi: tepat sasaran penerimamamfaat, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktudan tepat administrasi di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektifitas berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efeknya. Efektivitas juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai karena adanya proses kegiatan. Adapun pengertian lain dari efektifitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi. Sedangkan efektivitas menurut beberapa ilmuwan adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas menurut mahmudi merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi.
- b. Efektifitas menurut agung kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
- c. Efektivitas menurut martini dan lubis merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang di tentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang di tentukan sebelumnya.

Pengertian efektivitas yang di temukan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

Penilaian suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan mamfaat yang di hasilkan oleh program tersebut. Kerena

efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut (Mahmudi,2005:92).

Efektivitas menjalankan pekerjaan dengan benar, dimana dapat juga dikatakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat serta ukuran pertasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan agar sasaran organisasi tercapai. Artinya sejauh mana manajer tersebut menjalankan kegiatan secara efektif (Sukirno,2006 :108). Efektivitas menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Sondang P. siagan efektivitas adlah pemamfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadarditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dilakukannya.
- b. Menurut Roulette efektivitas adalah dengan melakukan yang benar pada saat yang tepat untuk jangka waktu yang panjang, bail paga organisasi tersebut dan pelanggaran.
- c. Menurut Gipson efektivitas adalah pencaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.
- d. Pengertian para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Jadi apabila tujuan telah tercapai barulah dikatakan efektif (mahardita, 2017: 136).

2. Tujuan Efektifitas

- a. Agar seseorang dapat menghasilkan tujuan sengan baik.
- b. Memberikan gambaran kepada seseorang dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melakukan suatu pekerjaan. Efektivitas memiliki tiga tingkatan yaitu:

- 1) Efektivitas individu berdasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
- 2) Efektivitas kelompok jumlah kontribusi dari semua anggota
- 3) Efektifitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok sehingga didapatkan hasil tiap-tiap bagianya (Sukirno,2006 :108).

3. Indikator Efektifitas

Berikut kriteria atau ukuran efektifitas menurut Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. Gibson dalam bukunya”Tranformasi Pelayanan Publik” yaitu (Kurniawan,2005:107):

- a. Kejelasan tujuan hendak di capai, hal ini ditunjukan supaya karywan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan trategi mencapai tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti menentukan wawasan waktu, dampak dan pemutusan upaya.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan srategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembati tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, diperlukan untuk mengambil keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.
- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab

apabila tidak, para pelaksana akan berkurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses pelaksanaan suatu programan agar berjalan dan efektif.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tidak dapat mencapai tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dan tercapai.

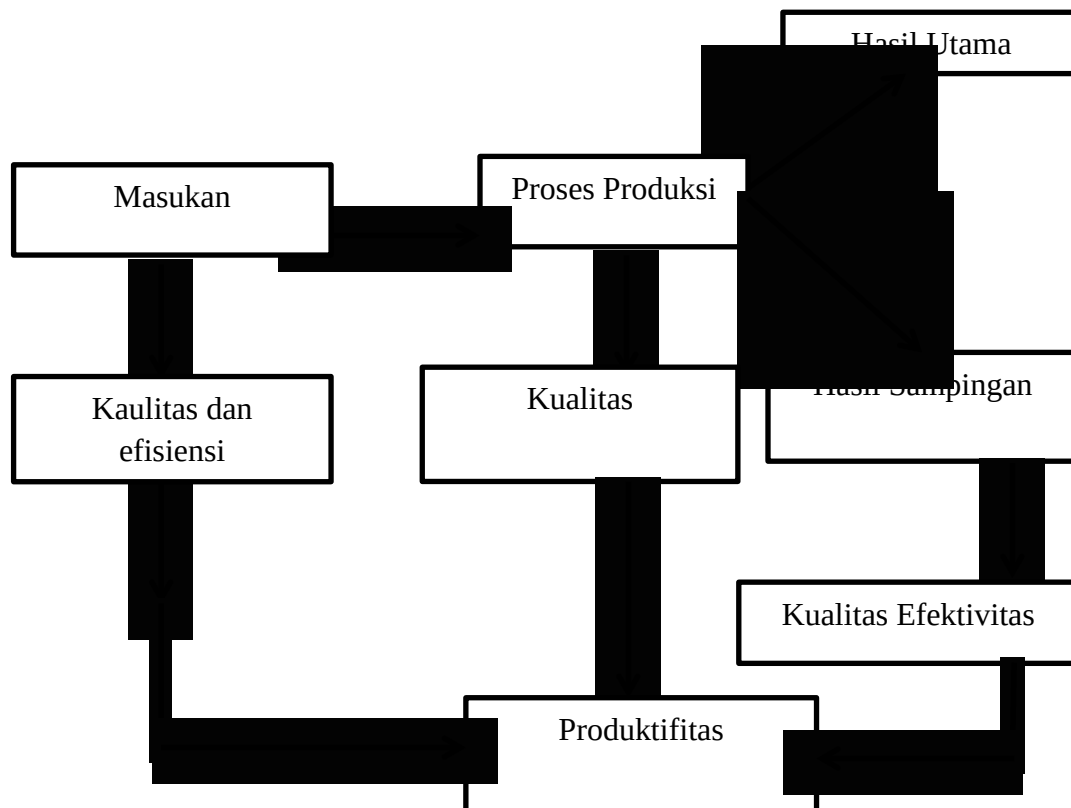
Menurut pendapat Tanpubolon yang dikutip ismail Nawawi dalam bukunya “Budaya Organisasi Kepemimpinan dan kinerja” menyebutkan kriteria efektifitas organisasi, sebagai berikut (Nawawi, 2012: 196):

- a. Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya.
- b. Efisiensi sebagai kriteria efektifitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi.
- c. Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya.
- d. Keadaptasian sebagai kriteria efektifitas mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal.
- e. Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektifitas mengacu kepada tanggung jawab organisasi atau perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Dua kriteria untuk mengukur efektivitas yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan ukuran efektivitas merupakan suatu standar ukuran yang digunakan untuk mengukur efektifitas yaitu menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi dapat melakukan program atau kegiatan dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga terpenuhinya semua target, sasaran dan tujuan yang akan tercapai.

4. Ukuran Efektifitas

Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapainya sesuai apa yang telah direncanakan. Berikut ini adalah keterkaitan antara efisiensi, efektivitas, kualitas dan produktivitas yang secara skematis dapat digambarkan pada gambar .1 yaitu



Sumber: Sedarmayanti, 2009:60

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa keterkaitan efisiensi, efektivitas, kualitas dan produksi bahwa efisiensi dapat dikatakan sebagai ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan (*input*). Efektivitas ini merupakan gambaran seberapa jauh target yang dapat tercapai yang dapat dilihat dari kualitas yang memadai. Kualitas ini berpengaruh pada hasil yang akan di capai. Produktivitas individu merupakan perbandingan dari efektivitas keluRn (pencapaiannya hasil kerja yang maksimal) dengan efisiensi salah satu masukan (tenaga kerja) yang mencakup kualitas dalam satuan waktu tertentu. Jadi ukuran efektivitas suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut ini (Sedermayanti,2009:60):

- a. *Input*
- b. Proses produksi
- c. Hasil (output)
- d. Produktivitas

5. Ukuran Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTM. Indikator-indikator variable dapat diukur sebagai berikut:

- a. Indikator masukan, merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya dana, tersedianya pedoman umum (pedum) dan persiapan sosialisasi.

- b. Indikator proses, merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukan verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi.
- c. Indikator keluaran, setelah dilakukan sosialisasi RTM mengerti akan tujuan PKH kepada RTM penerima bantuan
- d. Indikator mamfaat, dan yang diterima RTM merupakan dana yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesehatan.
- e. Indikator dampak, merupakan hasil dari program PKH yang disesuaikan dengan perilaku RTM dan para pengelola Program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik bagi petugas dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan akan tercapai dengan baik (Mahmudi,2005,hal 92).

6. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sarsaran merupakan hal penting yang menentukan berhasil atau tidaknya program. Program dapat dikatakan efektif, apabila sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan aturan yang telah disepakati, Makmur (2011:7) menjelaskan bahwa sasaran yang tepat, baik individu maupun secara organisasi sangat menentukan suatu keberhasilan.

1) Kriteria komponen kesehatan

Sasaran kriteria kesehatan Program Keluarga Harapan (PKH) di nagari tiumang dalam komponen kesehatan sudah sesuai kriteria sasaran yang telah diteteapkan. Kriteria komponen kesehatan di nagari tiumang telah mencakup keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar di Basis data Terpadu (BDT) yang memiliki komponen ibu hamil atau menyusui atau anak ebrusai 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Ketepatan sasaran kriteria komponen kesehatan di nagari tiumang, dapat terjadi arena adanya

beberapa cara yang dilakukan pedamping PKH yaitu melakukan verifikasi antara Basis Data Terpadu (BDT) dengan keluarga penerima manfaat komponen kesehatan di nagari Tiumang, yang dilakukan melalui verifikasi rutin maupun *home visit* oleh pedamping PKH setiap tiga bulan kepada para PKM di nagari Tiumang dan terjalinnya koordinasi baik dengan pihak berwenang mulai dari kelurahan, RW sehingga RT setempat guna memudahkan proses evaluasi.

- 2) Didalam sasaran kriteria komponen pendidikan di nagari Tiumang telah sesuai sasaran, yaitu mencakup warga miskin dan rentan miskin yang memiliki anak SD, SMP dan SMA yang telah terdaftar dalam BDT, namun belum mencakup semua warga miskin dan rentan miskin yang sesuai kriteria sasaran komponen pendidikan, hal ini menyebabkan sasaran kriteria sasaran komponen pendidikan, hal ini menyebabkan sasaran kriteria pendidikan belum sepenuhnya efektif . penyebab sasaran kriteria komponen pendidikan belum efektif ialah masih ditemukan keluarga penerima manfaat yang hidupnya lebih berkecukupan menjadi sasaran, terdapat ketidaksesuaian dalam mengisi form surat keterangan tidak mampu mengakibatkan data tidak terdaftar dalam BDT dan tidak adanya kriteria komponen sasaran menyebabkan data tidak di proses oleh data pusat Data dan informasi kesejahteraan sosial.

3) Kriteria komponen kesejahteraan Sosial

Sasaran kriteria komponen kesejahteraan sosial program keluarga harapan (PKH) di nagari Tiumang, dalam komponen lanjut usia belum mencakup semua lansia sesuai sasaran, sedangkan pada penyandang disabilitas telah sesuai sasaran yaitu telah mengcover semua penyandang disabilitas berat dari keluarga miskin . penyebab belum tercakup semua lansia sesuai kriteria dalam komponen

kesejahteraan sosial ialah belum terdaftarnya lansia dalam Basis Data Terpadu dan tidak lagi sesuai sasaran. Minimnya informasi mengenai persyaratan pendaftaran PKH, mengetahui alur pendaftaran PKH secara lebih detail.

b. Ketetapan Tujuan

Ketetapan tujuan dalam suatu program merupakan hal penting yang berpengaruh pada hasil akhir suatu program, makmur (2011:7) menjelaskan bahwa ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, akan sangat menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi pada jangka panjang.

- 1) Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat program keluarga harapan

Melalui kemudahan akses dalam pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum efektif. Tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya efektif. Program keluarga harapan (PKH) telah meningkatkan jumlah KPM yang bersekolah dengan wajib belajar 12 tahun, ibu hamil, bayi dan balita telah memeriksakan kesehatannya dengan mudah dan rutin dan lansia diperhatikan kesehatannya melalui posyandu lansia dan penyandang disabilitas melalui *home visit* untuk mengetahui kesehatannya, namun masih terdapat KPM yang duduk di sekolah menengah pertama tidak mau melanjutkan sekolah yang membuat bantuan di pending dan menimbulkan iri pada masyarakat yang belum menjadi KPM.

- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin.

Tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan di nagari Tiumang telah berjalan, hal tersebut dapat dilihat dari sebagian keluarga menerima mamfaat yang sudah digunakan sesuai aturan yaitu untuk komponen pendidikan digunakan untuk pembayaran uang sekolah, dalam komponen kesehatan dan kesejahteraan untuk pemenuhan gizi dari ibu hamil, bayi 0(nol) hingga 6 (enam) tahun, lansia dan penyandang disabilitas. Masih ditemukan keluarga penerima mamfaat yang menggunakan bantuan untuk membeli pulsa, jalan-jalan bahkan untuk mempercantik diri yang tidak sesuai dengan aturan PKH untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, itdak adanya kewajiban pengumpulan bukti penggunaan bantuan membuat KPM belum sepenuhnya mengalokasikan bantuan sesuai aturan.

- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian kelaurga penerima mamfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Terdapat perubahan perilaku pada keluarga penerima mamfaat dalam pendidikan baik anak maupun kelaurga penerima mamfaat yang bersekolah hingga perguruan tinggi yang menjadi cerminan bahwa keluarga penerima mamfaat telah menganggap pendidikan merupakan hal yang penting, dalam mendidik anak keluara penerima mamfaat sudah berkurang berkata maupun tindakan kasar dan tercipta kesadaran untuk bersikap sopan. Di dalam bidang kesehatan keluarga penerima mamfaat telah rutin memeriksa kesehatan di fasilitas kesehatan yaitu posyandu dan puskesmas bukan di dukun, seperti yang dulu dilakukan. Dalam menciptakan

kemandirian belum dapat tercapai, hal ini dikarenakan sulit menanamkan jiwa wirausaha sejak dini untuk berani membuka usaha, hal ini dikarenakan sulit menanamkan jiwa wirausaha sejak dini untuk berani membuka usaha, hal ini disebabkan oleh rasa takut akan gagal dan tidak kembalinya modal dalam berwirausaha.

- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Di dalam mengurangi kemiskinan belum berhasil, sedangkan untuk pengurangan kesenjangan telah dirasakan oleh KPM nagari Tiumang.

Tidak terdapat pengurangan jumlah keluarga miskin dan rentan miskin berdasarkan graduasi hasil pemuktahiran sosial ekonomi sejak tahun 2013 hingga 2017. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan mengurangi kemiskinan di nagari Tiumang sejak tahun 2013 hingga 2017. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan belum efektif, padahal pendamping PKH nagari tiumang telah melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui pencairan tepat waktu dan sosialisasi penggunaan dana untuk mengurangi kemiskinan, tetapi hal tersebut belum dapat membuat tujuan tercapai. Sulit merubah mindset keluar dari jurang kemiskinan, menyebabkan hanya pengurangan kesenjangan yang telah dirasakan oleh keluarga penerima manfaat di nagari Tiumang melalui pemenuhan makan sehari-hari bagi keluarga penerima manfaat.

- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Tujuan pengenalan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM telah dilakukan, namun belum mencapai tujuan telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sosialisasi melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) pelaksanaannya belum dapat sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah dibuat.

pedamping PKH, terdapat KPM yang belum dapat hadir dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.

c. Ketepatan Biaya

Ketepatan biaya merupakan factor yang mempengaruhi efektivitas program makmur (2011 :7) menjelaskan ketepatan biaya berkaitan dengan pemanfaatan biaya dan tidak mengalami kelebihan jumlah pembiayaan sampai kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

- 1) Pemanfaatan biaya yang tepat di dalam pemanfaatan biaya, belum terdapat dikatakan efektif.

Terdapat kendala yang menyebabkan pemanfaatan biaya tidaklah sesuai seperti membeli pilsa, rokok, makeup, pembayaran listrik, jalan-jalan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan PKH. Hal ini terjadi karena adanya control dan kewajiban mengumpulkan bukti penggunaan biaya bantuan bagi KPM, sehingga tingkat tanggung jawab keluarga menerima manfaat rendah.

- 2) Tidak mengalami kekurangan atau kelebihan jumlah biaya

Di dalam kriteria kurang atau lebihnya jumlah biaya, masih terdapat kendala permintaan jumlah bantuan tanpa melihat jumlah kriteria per keluarga membuat KPM merasa bantuan masih kurang, namun perbedaan sesuai jumlah kriteria menimbulkan kecemburuan, sehingga jumlah bantuan masih menjadi masalah. Terdapat keluarga penerima manfaat yang saldo ATM nya kosong dan kartu ATM hilang, hal ini menyebabkan bantuan haruslah dipotong untuk biaya administrasi dan KPM tidak dapat 100% menyerap bantuan dan penggunaan bantuan menjadi sesuai waktu yang ditentukan.

d. Ketepatan berfikir

Ketepatan berfikir merupakan salah satu factor yang mempengaruhi efektifitas suatu program. Makmur (2011 :7) menjelaskan bahwa ketepatan berfikir dan melahirkan keefektifan, sehingga senantiasa melalui tenaga kerja yang menjalankan tugas dengan baik dan melakukan bentuk kerjasama yang dapat memberikan hasil maksimal.

Di dalam ketepatan berfikir, Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya telah memfasilitasi kerbelangsungan UPPKH dan mengontrol bantuan yang diterima KPM, Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya menjalankan tugasnya meski melakukan kunjungan ke nagari Tiumbang hanya satu kali. Unit pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) kabupaten Dharmasraya untuk melakukan kunjungan rutin untuk membantu pendamping dan KPM. Pendamping Program Keluarga Harapan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik itu, telah terjalin kerja sama antara dinas Sosial kabupaten Dharmasraya dan UPPKH kabupaten Dharmasraya nagari Tiumbang dengan ketua kelompok PKH nagari Tiumbang.

7. Faktor penghambat keefektifan program keluarga Harapan (PKH)

a. Koordinasi

Koordinasi merupakan hal penting yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya. Di dalam program keluarga harapan (PKH) di nagari Tiumbang, koordinasi menjadi penghambat yang membuat program tidak efektif. Menurut Suharto (dalam jurnal ekardo, 2014, 7), koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling mengatur dan menyepakati sesuatu.

Tidak mendapat koordinasi dalam Program Keluarga Harapan di Nagari Tiumbang terkait dengan pengelolaan data sasaran PKH. Unit pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten

Dharmasraya, maupun pihak kelurahan, RT dan RW belum dapat koordinasi untuk merekomendasikan keluarga miskin dan rentan miskin menjadi keluarga Penerima manfaat, karena semua pengelolaan dan data berasal kementerian sosial. Hal ini mengakibatkan terdapat keluarga miskin dan rentan miskin yang belum menjadi keluarga penerima manfaat karena tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu.

b. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu hal yang penting yang mempengaruhi dalam efektif tidaknya suatu program. Perencanaan dibutuhkan agar terciptanya efektivitas PKH, namun nyatanya perencanaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Tiunang belum matang. Menurut Saagian (2015:34). Perencanaan adalah keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan sekarang dan apa yang akan dikerjakan di masa depan.

Belum terdapat perencanaan yang matang dalam Program Keluarga Harapan dalam menciptakan kemandirian maupun mengurangi kemiskinan. Pendamping hanya mengarahkan pada wirausaha tanpa memberikan arahan apa yang harus KPM lakukan dan di dalam mengurangi kemiskinan tidak ada kewajiban bagi KPM untuk mengumpulkan bukti penggunaan bantuan yang menyebabkan bantuan belum mengurangi kemiskinan.

c. Ketepatan Layanan

Ketepatan layanan merupakan hal yang penting yang berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya program. Menurut Repley (dalam Joyo, 2017:4), ketepatan layanan digunakan untuk menilai apakah layanan yang diberikan dalam suatu program dilakukan tepat apa tidak oleh sasaran.

Ketepatan layanan belum berjalan baik. Hal ini dikarenakan keluarga penerima manfaat belum menjalankan pengenalan jasa

keuangan yang tepat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, masih ditemukan KPM yang tidak dapat mengoperasikan ATM dan menitip saat pencarian bantuan (jurnal Ekardo,2014).

8. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang System Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4956).
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lemabaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republic Indonesia Nomor 4965)
- c. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 5294).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5449)
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara Republic Indonesia 5235)
- f. Peraturan President Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementrian Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
- g. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nono Tunai (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)
- h. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2015 Tentang Kementrian Sosial (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 86)

- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125)
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 Tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 2147).(Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Keluarga Harapan).

C. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Menurut Alma (2007:49) distribusi merupakan sekumpulan lembaga yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya untuk melakukan kegiatan kegiatan penyaluran barang atau jasa sehingga untuk dipergunakan oleh konsumen (pembeli).

Distribusi merupakan penambahan waktu, tempat dan barang kepemilikan barang yang mencakup juga pengangkutan barang-barang dari tempat asal atau produksi ke tempat penjualan. Dalam hal ini distribusi mencakup pengangkutan dan pergudangan. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang dan jasa kepada produsen ke konsumen dan para pemakai. Peranan saluran distribusi dalam pemasaran tercermin dari biaya administrasi pemasaran biaya pemasaran lainnya. Peranan yang besar dapat ditunjukkan kepada peranan yang baik terhadap fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan di setiap saluran (Prasetyo,2008: 120).

Dalam menentukan jumlah penyalur, produsen dihadapkan dengan tiga alternative seperti yang dikemukakan oleh basu Swastha sebagai berikut:

a. Distribusi Intensif

Distribusi ini dapat dilakukan oleh produsen yang menjual barang konvinien. Produsen berusaha menggunakan penyalur, terutama pengencer sebanyak-banyaknya untuk mendekati dan mencapai konsumen.

b. Distribusi selektif

Produsen berusaha memilih jumlah pedagang besar atau pengencer yang terbatas dalam suatu daerah geografis. Biasanya saluran ini dipakai untuk memasarkan produk baru, barang shopping atau barang industri jenis *accessoryquipmen*.

c. Distribusi Eksklusif

Produsen hanya mnegggunakan suatu pedagang besar atau pengencer di suatu daerah pasar tertentu. Distribusi ini di pakai untuk barang-barang yang membutuhkan service purna jual. Mamfaat yang bisa diambil dalam distribusi ini adalah produsen dapat menekan harga penyaluran.kegiatan distribusi merupakan penghubung antara kegiatan produksi dan kosumsi. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan distributor. Dalam kegiatan ekonomi, distribusi merupakan kegiatan yang berada sampai ketangan konsumen memerlukan adanya lembaga yang di sebut dengan distributor (Prasetyo,2008:128).

2. Tujuan Distribusi

Tujuan distribusi baik yang dilakukan oleh individu atau lembaga adalah sebagai berikut:

- a. Kelangsungan kegiatan produksi terjamin. Produsen atau perusahaan membuat barang untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil

penjualan yang kembali digunakan untuk proses produksi dimana keuntungan tersebut didapatkan jika terdapat distributor.

- b. Barang dan jasa hasil produksi dapat bermamfaat bagi konsumen. Barang atau jasa tidak akan ada artinya jika tetap di tempat produsen. Barang atau jasa dapat bermanfaat bagi konsumen jika tidak ada kegiatan distribusi.
- c. Konsumen memperoleh barang dan jasa dengan mudah. Tidak semua barang dan jasa dapat dibeli langsung konsumen dari produsen dimana hal ini membutuhkan penyalur atau distribusi dari produsen ke konsumen(yusuf,2017:5).

3. Jenis-Jenis Distribusi

Berdasarkan hubungan antara produsen dan konsumen, system distribusi dibedakan menjadi antara lain sebagai berikut:

- a. Distribusi Langsung : pengertian distribusi adalah penyaluran atau penjualan barang yang dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen yang dilakukan tanpa perantara.
- b. Distribusi Tak Langsung : pengertian distribusi tak langsung adalah penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara.

4. Penerapan distribusi perdagangan

Distribusi dapat kaitkan dengan pemasaran, dimana distributor alat memasarkan sebuah produk atau barang kepada konsumen. Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia (Mohan,2005 :6).

Semua proses dalam distribusi pemasaran, mulai dari penampungan dari produsen sampai penyaluran barang ke konsumen membutuhkan biaya yang masing-masing tidak sama. Bila jarak antara produsen dan konsumen pendek. Maka biaya pengangkutan bisa diperkecil. Jika tidak terjadi

perubahan bentuk ataupun perubahan volume atau mutu maka biaya pengolahan jika tidak ada. Semakin panjang jarak dan semakin banyak perantara yang terlibat dalam distribusi, maka biaya distribusi semakin tinggi.

Saluran pemasaran adalah lembaga yang saling terkait untuk menjadikan produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi. Tanpa saluran distribusi yang efektif maka sulit bagi masyarakat untuk memperoleh barang yang dikonsumsi. Jadi adalah tugas saluran pemasaran untuk memindahkan barang dari produsen, sebab produsen tidak akan sanggup menyalurkan hasil produksinya sampai ketangan konsumen (Alma,2014:49).

5. Bauran Distribusi

Dalam memasarkan produk-produk dari produsen sampai ke tangan konsumen, perusahaan dapat memilih satu dari dua cara yang ada yaitu, memasarkan produknya langsung ketangan konsumen, atau menggunakan perantara pemasaran. Proses bergeraknya produk dari produsen ketangan konsumen bisa disebut saluran distribusi. Saluran distribusi adalah saluran yang dipakai produsen untuk menyalurkan barang hasil produksinya kepada konsumen, baik sampai pindahnya hak (penguasaan) sampai dengan pemindahan barang maupun hanya pemindahan barang maupun hanya pemindahan hak kepemilikannya saja. Saluran distribusi mengatasi kesenjangan utama dalam hal waktu, tempat dan kepemilikan yang memisahkan barang serta jasa dari mereka yang akan menggunakannya (Hardjanto,2005: 148).

6. Strategi Distribusi

Memilih jaringan distribusi yang tepat merupakan suatu bentuk keputusan strategis, hal ini menentukan jumlah dan biaya cakupan pasar yang diperoleh suatu produk, atau seberapa banyak perantara yang akan digunakan. Biasanya strategi bergantung pada jenis produk dan kadar cakupan pasar yang paling efektif dalam mengantarkan ke jumlah

pelanggan yang paling banyak. Pemasar berupaya membuat suatu produk mudah diakses di sejumlah lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

D. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian program keluarga harapan (PKH)

Program keluarga harapan (PKH) adalah perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutuskan kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan (KEMINFO RI,2011.18).

Program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga atau orang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. (Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Keluarga Harapan).

Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan bantuan tunai bersyarat (BTB) atau dikenal dengan program keluarga harapan (PKH). Di awal pelaksanaan ini didesain hanya untuk kelompok paling miskin agar mendapatkan akses kesehatan bagi ibu dan anak sejak dalam kandungan dan pendidikan sehingga dapat memutus rantai kemiskinan. PKH bukan merupakan lanjutan program subsidi langsung tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutuskan rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster 1 strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGS) yang akan terbantu oleh PKH yaitu : pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.

2. Tujuan program keluarga harapan (PKH)

Tujuan umum program keluarga harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kematian dan memutuskan mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama kelompok RTM. Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:

- a. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan Sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesehatan.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan mamfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

3. Kriteria Penerima Mamfaat PKH

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut beberapa aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban ini harus di penuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

a. Komponen Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protocol pelayanan kesehatan seperti:

- 1) Anak usia 0-6 tahun: anak 0-28 hari harus di periksa kesehatannya sebanyak 3 kali
- 2) Anak usia 0-11 bulan harus di imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan di timbang berat badan secara rutin setiap bulan
- 3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan february dan agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan timbang berat badan rutin setiap bulannya
- 4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badanya secara rutin untuk pantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program pendidikan anak usia dini (PAUD apabila lokasi atau posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD).

Ibu hamil dan ibu nifas seperti:

- 1) Selama kehamilan, ibu hamil harus memeriksakan kehamilan kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen
- 2) Ibu melahirkan harus di tolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
- 3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan atau di periksa kesehata dan mendapatkan pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 kali pada minggu I, iV dan VI.

b. Komponen Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan opendidikan minimal 85% dari

hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan seperti di bawah ini:

- 1) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- 2) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun , anak peserta PKH tersebut harus di daftarkan atau terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SMP/MTS terbuka).
- 3) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maka peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun pendidikan kesetaraan.
- 4) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan belajar keaksaraan fungsional di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) terdekat.
- 5) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut pekerja anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu cukup lama , maka data anak tersebut akan didaftarkan dan di sampaikan kepada dinas tenaga kerja dan dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan program pengurangan pekerja anak.
- 6) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau di sebut anak jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam jangka waktu yang sangat lama, data anak tersebut akan di datarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten atau kota untuk mendapatkan program kesejahteraan sosial anak.

Lansia 70 tahun keatas:

- 1) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja atau mengurangi pukesmas santun lanjut usia (jika tersedia)

- 2) Mengikuti kegiatan sosial (*day care*).

Penyandang disabilitas berat

- 1) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
- 2) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*).

Bila persyaratan di atas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota, hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- 2) Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- 3) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaris dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- 4) Bagi lansia yang udah di atas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat dapat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

4. Hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

- a. Bantuan sosial PKH
- b. Pendampingan Sosial PKH
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
- d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

5. Besaran Bantuan

Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu bantuan tetap dan bantuan komponen yang di berikan kepada RTM. Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti scenario bantuan yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Besaran Bantuan Komponen PKH

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (RP)
1	bantuan ibu hamil/menyusui	RP 2.400.000
2	Bantuan anak usia di bawah 6 tahun	RP 2.400.000
3	Bantuan peserta pendidikan setara SD/ sederajat	RP 900.000
4	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/ sederajat	RP 1.500.000
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/ sederajat	RP 2.000.000
6	Bantuan penyandang disabilitas berat	RP 2.400.000
7	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	RP 2.400.000

Sumber : *keputusan Dinas Sosial RI*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Apabila besaran bantuan yang di terima RTM melebihi batas maksimum atau dalam suatu anggota keluarga memiliki lebih dari 4 komponen menerima bantuan, maka bantuan yang di berikan adalah

hanya 4 komponen yang menerima bantuan. Slainitu ada bantuan tetap untuk setiap keluarga, bantuan ini hanya memberikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Reguler :Rp 550.000,-/keluarga/tahun
- b. PKH Akses :Rp 1.000.000,-/keluarga/tahun

Pembayaran bantuan dilakukan empat kali dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada tahap pertama pada bulan januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga Juli, dan tahap keempat Oktober. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintahan pusat. Jadwal pembayaran pada masing-masing kecamatan yang di putuskan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPKH) kabupaten/kota setelah koordinasi dengan lembaga pembayaran.

Dana bantuan dibayarkan langsung kepada peserta PKH pada lembaga pembayar yang diakses dengan kartu debit yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pencairan dana bantuan tersebut dilakukan secara bertahap pada saat pedamping PKH wajib memastikan kesesuaian antara Kartu Peserta PKH dengan Kartu identitas (KTP).

E. Pengentasan Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan Secara Umum

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar, akan tetapi berdampak pada ketidak mampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan

kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tertentu.

Shirazi dan Pramanik, sebagaimana dikutip oleh Irfan Syauqi Beik mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual.

Syami, sebagaimana dikutip oleh Cica Sartika dkk, menjelaskan bahwa kemiskinan dapat diartikan bahwa suatu keadaan dimana seseorang keluarga atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya. Penduduk miskin umumnya berada pada daerah pedesaan, hal ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Hans Dieter dan Suwardi mengatakan bahwa kemiskinan yang ada di kampung dapat digolongkan baik kemiskinan tempat tinggal maupun kemiskinan penduduk. Kemiskinan tempat tinggal kondisinya sebagai tempat tidak teratur sedangkan kemiskinan penduduk karena ditinjau dari segi sosial dan ekonominya sangat rendah termasuk penyediaan air dan listrik beserta prasarana yang minimum.

Berdasarkan pendapat tersebut mengenai kemiskinan maka dapat dipahami bahwa kemiskinan yaitu ketidakmampuan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

a. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpes No. 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi

Wakil Presiden RI, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (cluster) yaitu sebagai berikut:

1) Klaster I

Klaster I adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditunjukkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program bersifat angung dan klasifikasi program ini meliputi jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) dan pada tahun 2014 menjadi BPJS, Beras untuk keluarga miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

2) Klaster II

Klaster II adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Jenis program klaster II ini adalah PNPM Mandiri.

3) Klaster III

Klaster III adalah kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program pada klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dengan memberikan program program penanggulangan kemiskinan. Salah satu program pengentasan

kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah adalah PKH yang berupa bantuan tunai bersyarat yang ditujukan oleh Rumah Tangga Miskin (RTM).

2. Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam

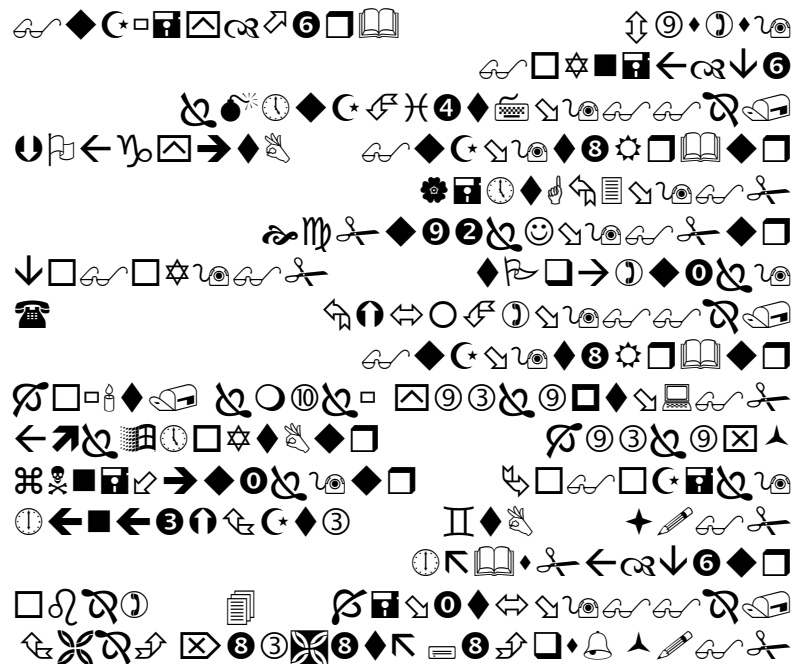
Wibisono sebagaimana dikutip oleh Sri Budi Cantika Yuli, mengatakan bahwa strategi pengentasan kemiskinan Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja yaitu:

- a. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor growth). Islam mencapai pro-poor growth melalui dua jalur utama; pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis.
- b. Islam mendorong penciptaan anggaran Negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (pro-poor budgeting). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai pro-poor budgeting yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran Negara sepenuhnya untuk kepentingan publik.
- c. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang member manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor infrastructure). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.
- d. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (pro-poor public services). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah

amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan.

- e. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (pro-poor income distribution). Terdapat tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak dan wakaf.

Jika dilihat dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa Islam sangat memperhatikan berbagai hal yang dapat mempengaruhi kehidupan untuk dapat hidup layak dan terhindar dari kemiskinan, perhatian tersebut dapat terlihat baik secara individu, kelompok/masyarakat maupun dibidang pemerintahan. Dalam Islam pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang dipimpin sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut:



Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Pada surat Al-Hadid ayat 25, dapat dipahami bahwa pemerintah haruslah amanah dan adil untuk mensejahterakan Negara yang ia pimpin. Komitmen Islam yang besar terhadap persaudaraan dan keadilan menuntut pada terpenuhinya kebutuhan hidup terutama pada kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan.

F. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan ini tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tujuan kepustakaan merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan, untuk itu penulis merujuk hasil penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang sehubungannya dengan judul dan masalah yang akan penulis teliti.

Skripsi Ridho Diana. Universitas Islam Negeri Raden Intan Jurusan Ekonomi Syariah, tahun 2018, yang judul “*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik survei deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di kota Jawa masuk dalam kategori tidak baik, dengan skor 1.080 atau 33% dari skor yang diharapkan 2520.

Skripsi yang dibuat oleh Ridho Diana terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti efektivitas PKH. Sementara penelitian yang penulis lakukan terfokus pada efektivitas PKH menurut ekonomi Islam di nagari Tiumang, kecamatan Tiumang, Kab. Dharmasraya.

Penelitian Dede Ridwan jurusan sosiologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UIN suanan Gunung Djati Bandung Tahun 2016, yang berjudul “*Efektifitas Program Keluarga Harapan Dan Memperdaya Masyarakat Miskin*” metode yang digunakan dalam penelitin ini adalah meyode kualitatif. Hasil penelitan menunjukan bahwa secara umum efektifitas keluarga harapan di desa tanung wang telah berjalan dengan baik.

Penelitian yang dibuat oleh Dede Ridwan terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulis lakukan. Persamaannya terletak pada metode yang digunakan sama-sama kualitatif. Sedangkan peraedaannya terletak pada teknik pengumpulan data yaitu pada penelian Dede Ridwan nmenggunakan penyebaran kuesioner sedangkan penulis tidak menggunakan itu.

Penelitian Farida Umaroh jurusan ilmu pemerintah universitas pancasakti tegal tahun 2018, yang berjudul “ *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal*: metode penelitian menggunakan kualitatif. Hasil penelitiannnya menunjukan bahwa pelaksaaan kegiatan program keluarga harapan dilihat proses pelaksanaan sudah sesuai dengan alur pelaksanaan, namun sesuai dengan indicator PKH masih ada kekurangan, belum tepat sasaran, proses sosialisai dan penyaluran bantuan.

Penelitian yang di buat oleh farida Umaroh terdapat adanya persamaan dan perbedaan *dengan* penelitian yang penulis lakukan. Persamaan adalah sama-sama meneliti efektifitas PKH dan metode yang dilakukan juga sama-sama kualitatif. sedangkan perbedaan terletak pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pengangkatan masalah ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Nagari Tiumang Kabupaten Dharmasraya. Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang di dapatkan dari objek yang di teliti (Arikunto,2007:213).

Metode penelitian yang penulis dilakukan adalah metode *deskriptif kualitatif*. Deskriptif Kualitatif yaitu penggambaran secara fakta, data, atau objek material yang bukan berupa angka melainkan ungkapan atau penjelasan (Cahyani, 2018, hal.30).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis yang mana terhitung dari pelaksanaan obsevasi awal yang penulis lakukan sejak bulan Desember 2020 sampai dengan Mei 2021. Untuk mempermudah kegiatan penelitian hingga pembuatan skripsi sampai dengan sidang mauqasah penulis membuat *time schedule* sebagai berikut:

Tabel 3.1
Waktu penelitian

		2020-2021					
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Observasi Awal						
2	Bimbingan Proposal Skripsi						
3	Seminar Proposal Skripsi						
4	Perbaikan Setelah Seminar						
5	Pembuatan Daftar Pertanyaan Panduan Wawancara						
6	Pengumpulan Data Penelitian						
7	Pengumpulan Data Penelitian						
8	Bimbingan Skripsi						
9	Munaqasyah						

C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti langsung menjadi instrument kuncinya dengan cara peneliti langsung berada dilapangan untuk meneliti yaitu:

1. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan dan mengambil dokumentasi.
2. Instrument pendukungnya, peneliti menggunakan alat-alat bantu seperti Handphone, kamera, buku catatan, dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan penelitian.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengelola program Keluarga Harapan (PKH) dan warga nagari Tiumang yang menerima Program Keluarga Harapan dan Warga yang tidak menerima Program Keluarga Harapan Tersebut.
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa catatan, laporan-laporan mengenai efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar-benar valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai, maka penelitian ini menggunakan metode yaitu:

1. Wawancara (*in dept interview*)

Wawancara yang saya lakukan kepada kepala jorong Tiumang adalah mengenai proses dan efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya yang secara langsung peneliti peroleh dengan Tanya jawab sambil tatap muka dengan Kepala Jorong Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.

2. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan di nagari Tiumang adalah mengamati Secara langsung efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.

3. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Sifat

utama dari data inital terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam. Teknik pengumpulan data ini dilakukan guna membantu proses penelitian

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif sebagaimana di kutip moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinteksiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, seperti fakta-fakta yang khusus dan konkrit selanjutnya dikembangkan sebagai hipotesis.

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan ditinjau dari ekonomi Islam.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk memperoleh kriditabilitas atau tingkat kepercayaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triagulasi, dalam teknik pengumpulan data, trigulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data fan sumber data dan sumber data yang ada. Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi metode dan trigulasi sumber, yaitu:

1. Membandingkan wawancara dengan dokumen yang tersedia
2. Membangdingkan hasil wawancara informan yang satu dengan yang lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Nagari Tiumang

Nagari Tiumang merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Tiumang. Asal nama Nagari Tiumang adalah bermula dari kedatangan Dt. Rajo Sinaro dan Dt Gumantan Sati dari Pariangan Padang Panjang (luak Tanah Datar) menuju ranah Batang Hari sampai ke Tiumang, sesampainya mereka di Tiumang ditemukannya bekas tungku orang memasak yang disebut dengan Tumang, sehingga mereka tinggal didaerah ini dan di buatlah suatu perkampungan yang diberi nama dengan **Tumang**, Nama Tumang adalah sahari ado sahari banamo.

Tiumang adalah salah satu Nagari nan terletak di Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada umumnya masyarakat Nagari Tiumang adalah petani, pekebun dan beberapa masyarakatnya pedagang dan peternak

b. Letak Geografis

Luas Nagari Tiumang adalah 4949 Ha. Jorong yang paling luas adalah Jorong Tiumang dengan luas $\pm$ 2074 Ha, dan yang paling kecil adalah Jorong Sei. Kalang I dengan luas 885 Ha, Adapun luas masing-masing Jorong di Nagari Tiumang dapat dilihat pada tabel dan Grafik berikut :

Tabel 4. 1
Luas Nagari Tiumang

No	Nama Jorong	Luas (Ha)
1	Tiumang	2.074
2	Sungai Kalang I	885

3	Sungai Kalang II	975
4	Bukit Harapan	1.015
	Jumlah	4.949

Sumber : Dokumen Profil Nagari Tiumang 2019

Keadaan iklim Di Nagari Tiumang beriklim tropis yang mempunyai suhu 32 °C pada siang hari dan 23 °C pada malam hari. Nagari Tiumang dapat Di tempuh 1 Jam dari Pusat Kabupaten Dharmasraya, Batasan Nagari Tiumang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Koto Beringin
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sipangkur
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Silang Gaung

2. Keadaan Demogratis Nagari Tiumang

a. Jumlah Penduduk

Sesuai dengan data dari kantor Wali Nagari Yiumang jumlah Penduduk di Nagari Tiumang memiliki jumlah total penduduk sebanyak 4149 jiwa yaitu 1117 KK dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. 2

Jumlah Penduduk Per Jorong Nagari Tiumang

No.	Nama Jorong	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		L	P	J	KK
1.	Tiumang	281	309	602	151
2	Sei. Kalang I	628	524	1152	327
3.	Sei. Kalang II	817	783	1600	413
4.	Bukit Harapan	410	397	807	226
	Jumlah	2136	2013	4149	1117

Sumber : Dokumen Profil Nagari Tiumang

b. Data penduduk menurut tingkat pendidikan

Berikut adalah data penduduk menurut tingkat pendidikan yang telah di tempuh, dan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3
Data penduduk menurut tingkat pendidikan di Nagari Tiumang

No	Uraian Tingkat Pendidikan	Tiumang	Sungai Kalang I	Sungai Kalang II	Bukit Harapan	Jumlah
1	Belum Sekolah	98	253	280	170	801
2	Tidak Tamat SD	112	240	360	140	852
3	Tamat SD	100	220	290	130	740
4	Tamat SLTP	103	209	270	125	707
5	Tamat SLTA	93	120	220	122	555
6	DI,DII,DII,SI,SII	96	110	180	120	506
Jumlah Total		602	1.152	1.600	807	4.161

Sumber: Dokumen Profil Nagari Tiumang

Dari data kependudukan Nagari Tiumang diatas mayoritas penduduk nagari Tiumang tidak tamat Sekolah Dasar dan angka tertinggi data penduduk selanjutnya Penduduk yang Tamat Sekolah Dasar juga Tinggi. Ini menandakan bahwa tingkat pendidikan Masyarakat Nagari Tiumang masih rendah.

c. Mata Pencarian

Tabel 4.4
Mata pencarian Nagari Tiumang

1	Petani	800
2	Buruh Tani	660

3	Buruh Swasta	160
4	Pegawai Negri	120
5	Pedagang	70
6	Bidan	8
7	Sopir	60
8	Dukun pijat	4

Sumber: Dokumen Profil Nagari Tiumang

Data Kependudukan diatas dapat di lihat masyarakat Nagari Tiumang Mayoritas bekerja sebagai Petani. Dengan rendahnya tingkat Pendidikan dan kurang ketrampilan masyarakat sehingga masyarakat nagari Tiumang lebih banyak berprofesi sebagai petani dan buruh.

d. Kesejahteraan Keluarga

Tabel 4.5
Kesejahteraan Keluarga

1	Jumlah Keluarga Pra Sejara	327 Keluarga
2	Jumlah Keluarga Sejahtera I	513 Keluarga
3	Jumlah Keluarga Sejahtera II	164 Keluarga
4	Jumlah Keluarga Sejahtera III	103 Keluarga
5	Jumlah Keluarga IV	10 Keluarga
6	Jumlah Keluarga	1117 Keluarga

Sumber : Dokumen Profil Nagari Tiumang

Dari data kependudukan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Nagari Tiumang mayoritas penduduknya berada dalam keluarga pra sejahtera. Dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan sehingga menjadi salah satu penyebab keluarga pra sejahtera.

e. Aspek pendidikan

Kondisi perkembangan pendidikan di Nagari Tiumang dapat dikatakan cukup baik. Ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang sudah

semakin tinggi. Banyak penduduk nagari tiumang yang sudah menempuh pendidikan ke perguruan tinggi.

Fasilitas pendidikan yanr telah ada di Nagari Tiumang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Fasilitas Pendidikan Nagari Tiumang

No	Nama Pendidikan	Jumlah
1	PAUD dan TK	9
2	Sekolah Dasar	5
3	Sekolah Menengah Pertama	1
4	Sekolah Menengah Atas	1

Sumber : *Dokumen Profil Nagari Tiumang*

Dari tabel diatas jumlah fasilitas Nagari Tiumang dapat diketahui bahwa tersedia fasilitas pendidikannya yang ada yaitu, 9 tingkat PAUD dan TK, tingkat SD berjumlah 5, tingkat SMP 1 dan tingkat SMA 1 dengan jumlah keseluruhan 16 unit. Dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi masyarakat Nagari Tiumang harus sekolah di luar Daerah Nagari Tiumang.

f. Aspek Keagamaan

Nagari tiumang merupakan nagari yang berada di Kecamatan Tiumang yang seluruh masyarakatnya beragama islam. Sarana dan prasarana ibadah yang tersedia di Nagari Tiumang yaitu terdapat 4 Masjid dan 13 Mushallah dan dapat di pahami masyarakat Nagari Tiumang Semua beragama Islam.

g. Aspek Kesehatan, Sosial dan Budaya

Di Nagari tiumang terdapat poskesri (Pos Kesehatan Nagari) seorang bidan Desa yang berdomisili di Kecamatan Tiumang berlokasi di Nagari Tiumang. Untuk sektor sosial dan budaya masyarakat Nagari Tiumang dapat dikatakan sama dengan nagari lainnya, seperti kental unsur ramah tamah antar warga dan memiliki jiwa sosial yang tinggi seperti melihat warga yang sakit, melaksanakan kegiatan gontong royong, dan saling membantu warga yang ditimpa musibah.

h. Potensi Ekonomi

Mata pencarian masyarakat Nagari Tiumang sebagian besar adalah berpotensi sebagai petani dan sisanya pedagang, wiraswasta, PNS dan Karyawan Swasta dan lainnya. Pertanian dan peternakan adalah mata pencarian masyarakat pada nagari tiumang terdapat beberapa varietas mampu tumbuh dengan baik dan dianggap dapat membantu perekonomian masyarakat Tiumang diantaranya yaitu Sawit, karet, pinang dan lainnya.

Apabila dilihat dari potensi yang ada seharusnya pertanian masyarakat di Nagari Tiumang sudah mampu mengdongkrak pertanian masyarakat . namun ada sebagian masyarakat yang hanya menjadi buruh tani di lahan-lahan masyarakat dan kurangnya sector ini belum dapat perhatian yang serius dari pihak yang terkait.

3. Visi Dan Misi Nagari Tiumang

a. Visi Nagari Tiumang

“Maju dalam kebersamaan dan menciptakan Nagari Tiumang yang aman, tentram, adil dan makmur berdasarkan hidup komunal bernagari bersendikan **Adat Basandi Syara` Syara` Basandi Kitabullah**“

b. Misi Nagari Tiumang

- 1) Mewujudkan Pemerintahan Nagari Tiumang yang efektif dan profesional guna memberikan pelayanan yang prima melalui Jorong dan Kelembagaan Nagari Tiumang dengan penuh semangat dan

terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) untuk dapat menjadikan Pemerintah yang baik dan bersih (Good and clean Governance).

- 2) Mewujudkan masyarakat Tiumang madani yang berperilaku baik, taat hukum, tertib, aman dan adil sehingga Tiumang menjadi Nagari yang berkah (gema ripah loh jinawi/padi manguniang jaguang maupiah)
- 3) Mewujudkan peningkatan pembangunan fisik sarana dan prasarana yang memadai dengan indikasi kemantapan ekonomi masyarakat yang tangguh dan sejalan dengan budaya dukung lingkungan, adat, budaya, alam, anak nagari (toto tentrem karto raharjo/bumi sanang padi manjadi, anak kemenakan tumbuh adil dan santosa.

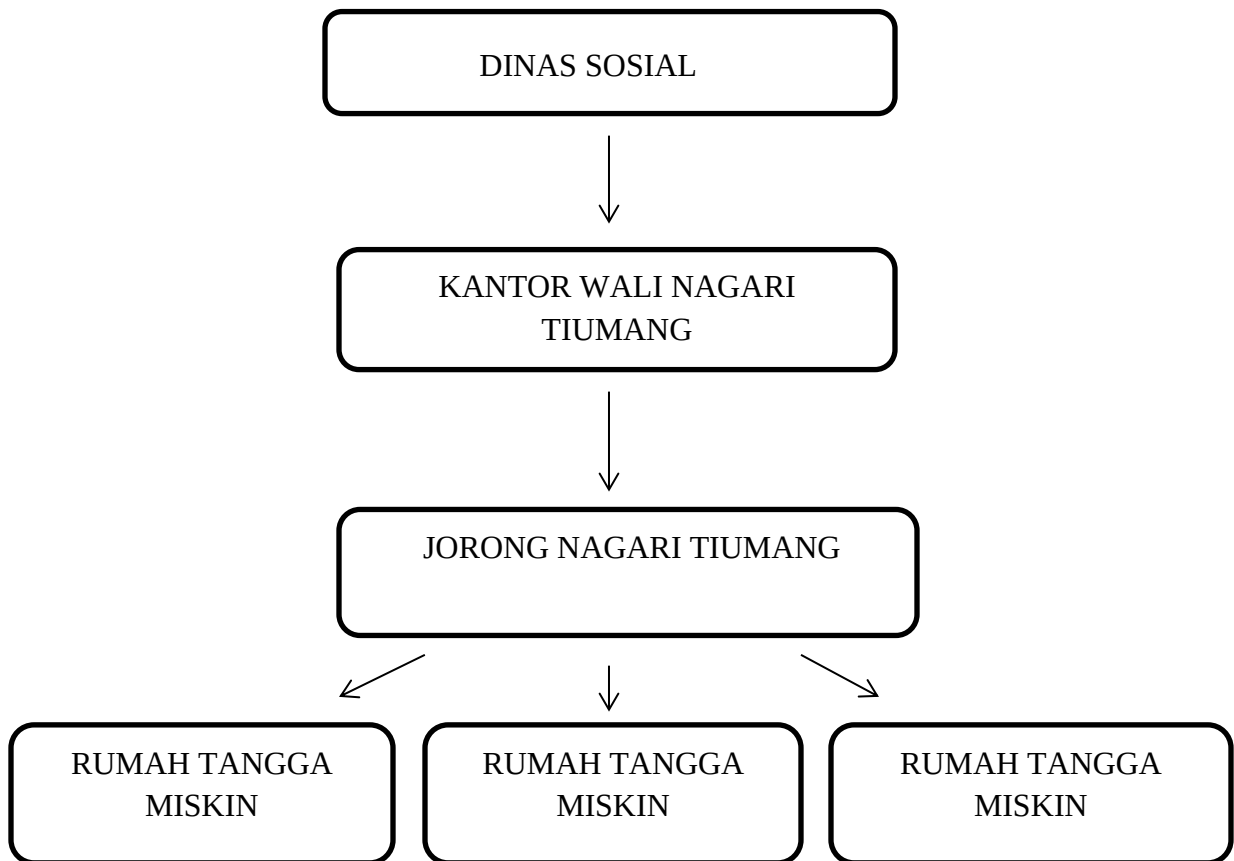
4. Gambaran Umum Distrubusi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Nagari Tiumang

a. Gambaran Umum Distribusi PKH

Dalam proses penyaluran beras PKH di mulai dari badan urusan logistik dinas sosial sebagai penyedia PKH kemudian di distribusikan langsung ke masing-masing Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya termasuk Nagari Tiumang kecamatan Tiumang. Setelah itu dilanjutkan tim pengelola PKH Nagari Tiumang menyalurkan PKH tersebut ke setiap jorong PKH akan di distribusikan dua hari setelah PKH di jorong.

Proses pendistribusian PKH kepada rumah tangga miskin (RTM) di tingkat jorong langsung di distribusikan oleh kepala jorong nagari Tiumang dengan cara diumumkan kepada masyarakat penerima PKH bahwa PKH sudah ada di dalam ATM penerima PKH dan sudah bisa diambil ke kantor nagari Tiumang. Setelah masyarakat penerima menjemput ke E-warung yang ada di Nagari Tiumang yang telah di tetapkan dengan membawa kartu PKH yang berisi uang yang dikirimkan pusat dan ditukarkan dengan beras dan telur.

Rumah Tangga miskin (RTM) menerima PKH sebanyak 5kg beras dan telur 1 sak penuh. Sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerinath pusat. Pengambilan PKH dilakukan oleh Rumah TanggaMiskin (RTM) dengan mengambil beras dan telur di E-warung yang telah di tunjuk oleh Wali Nagari dengan membawa Kartu PKH. JORONG NAGARI TIUMANG



Alur penyaluran PKH di nagari Tiumbang kecamatan Tiumbang

Sumber:Kepala jorong Nagari Tiuumang,2021

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Nagari Tiumbang Kecamatan Tiumbang dengan mewawancari kepala jorong Nagari Tiumbang , Pendamping PKH dan Masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH,

terdapat beberapa permasalahan dalam pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH), mulai dari permasalahan PKH yang distribusikan sampai di jorong tidak tepat waktu, dan pembagiannya kurang tepat, dan ada beberapa penerima PKH menerima 2 bulan sekali karna tidak ada saldo di ATM masing-masing.

1. Efektifitas Distribusi Program Keluarga Harapan Pada Nagari Tiumang

Efektivitas adalah kemampuan yang dilakukan berdasarkan indikator tertentu dalam mencapai tujuan program distribusi program keluarga harapan menurut ekonomi Islam yang telah ditetapkan. Adapun indikatornya adalah :

a. Tepat sasaran penerima mamfaat

Tepat sasaran penerima mamfaat adalah tepatnya penerima PKH berdasarkan database yang diberikan oleh dinas sosial (arif, wawancara riset 6 januari 2021 jam 14.00)

Ketepatan penerima PKH pada Nagari Tiumang sudah mulai tepat namun ada masyarakat yang tidak mampu, tidak mendapatkan PKH, dan berdasarkan observasi penulis dan daftar nama masyarakat yang dikategorikan tidak mampu dari kepala jorong terdapat 4 orang penerima PKH dikatakan mampu atau tidak dalam daftar nama masyarakat yang tidak mampu di nagari Tiumang dan ada 5 orang tidak termasuk penerima PKH.

Berikut daftar Rumah Tangga Miskin penerima PKH dari tahun 2017-2021 di nagari Tiumang Kecamatan Tiumang:

Tabel 4.7

Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Menerima PKH Tahun 2017

No	Nama Lengkap	Alamat Lengkap
1	Elita	Jorong Tiumang
2	Nurtini	Jorong Tiumang
3	Yurnalis	Jorong Tiumang
4	Ina	Jorong Tiumang

5	Yusmaniar	Jorong Tiumang
6	Sidas	Jorong Tiumang
7	Rosmawati	Jorong Tiumang
8	Ismaini	Jorong Tiumang
9	Ifit	Jorong Tiumang
10	Mulyanis	Jorong Tiumang
11	Nuranai	Jorong Tiumang
12	Dika	Jorong Tiumang
13	Irat	Jorong Tiumang
14	Rika warni	Jorong Tiumang
15	Sunarsi	Jorong Tiumang
16	Tarti	Jorong Tiumang
18	Giyanti	Jorong Tiumang
19	Darmi	Jorong Tiumang
20	Elya maharani	Jorong Tiumang
21	Salimatun	Jorong Tiumang
22	Eli yana	Jorong Tiumang
23	Kasmi atun	Jorong Tiumang
24	Yatik	Jorong Tiumang
25	Usmi	Jorong Tiumang

Sumber : Kepala Jorong Nagari Tiumang,2021

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2017 jumlah penerima PKH pada Nagari Tiumang sebanyak 20 orang dan penerima PKH tersebut benar-benar Rumah Tangga Miskin yang berpendapatan rendah yang membutuhkan PKH. Data tersebut Merupakan Data yang valid karena pendataan langsung dilakukan oleh kepala jorong Nagari Tiumang yang mengetahui bagaimana keadaan Masyarakat di wilayahnya.

Tabel 4.8
Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Menerima PKH Tahun 2018

No	Nama Lengkap	Alamat Lengkap
1	Elita	Jorong Tiumang
2	Nurtini	Jorong Tiumang
3	Yurnalis	Jorong Tiumang
4	Ina	Jorong Tiumang
5	Yusmaniar	Jorong Tiumang
6	Sidas	Jorong Tiumang

7	Rosmawati	Jorong Tiumang
8	Ismaini	Jorong Tiumang
9	Ifit	Jorong Tiumang
10	Mulyanis	Jorong Tiumang
11	Nuranai	Jorong Tiumang
12	Dika	Jorong Tiumang
13	Irat	Jorong Tiumang
14	Rika warni	Jorong Tiumang
15	Sunarsi	Jorong Tiumang
16	Tarti	Jorong Tiumang
18	Giyanti	Jorong Tiumang
19	Darmi	Jorong Tiumang
20	Elya maharani	Jorong Tiumang
21	Salimatun	Jorong Tiumang
22	Eli yana	Jorong Tiumang
23	Kasmi atun	Jorong Tiumang
24	Yatik	Jorong Tiumang
25	Usmi	Jorong Tiumang

Sumber : Kepala Jorong Nagari Tiumang,2021

Berdasarkan Tabel pada tahun 2017 jumlah penerima PKH sama dengan jumlah penerima PKH pada 2018 sebanyak 20 orang dan penerima PKH itu benar-benar Rumah Tangga Miskin yang berpendapatan rendah hal ini di lontarkan langsung oleh kepala jorong Nagari Tiumang yang mengetahui bagaimana keadaan masyarakatnya. Sedangkan pada tahun 2019 data penerima PKH di Nagari Tiumang sebanyak 25 orang atau KK tidak lagi sama dengan data yang ada pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 pendataan masyarakat tidak mampu yang akan menerima langsung di data oleh BPS.(wawancara Kepala Jorong Nagari Tiumang)

Ketidaktepatan sasaran tersebut terjadi akibat pada saat BPS melakukan pendataan masyarakat yang tidak mampu malu memberikan informasi yang sebenarnya kepada BPS. Sehingga terdapat 5 orang Rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan PKH yang tidak terdaftar dalam database penerima PKH di Nagari Tiumang. Berdasarkan Hasil

Wawancara dengan ibu Yusmaniar seorang penerima PKH di Nagari Tiumang :

”Bantuan PKH yang diberikan kepada kami belum memenuhi kriteria yang diinginkan, karena masih ditemukan adanya masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan PKH tersebut. Adanya diantara masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan di buktikan dengan tidak mendapatkannya kartu PKH dari Kepala jorong ataupun pendamping PKH”(Yusmaniar, wawancara, 21 Mai 2021)

Dari hasil wawancara dengan Yusmaniar dapat di pahami masyarakat Nagari Tiumang yang mendapatkan PKH yang mempunyai kartu PKH tersebut.

b. Tepat kualitas (Kualitas Beras Yang Tidak Memenuhi Kriteria Layak)

Tepat kualitas adalah tepat kualitas beras yang di tentukan oleh Dinas Sosial. Tepat kualitas, ditinjau dari kualitas beras PKH. Setiap Rumah Tangga Miskin mempunyai penilaian sendiri, kondisi ini disebabkan karena selera setiap masyarakat berbeda-beda, meskipun demikian beras yang dibagikan tetap dikonsumsi oleh masyarakat yang menerima PKH.

Kualitas beras yang di terima RTM sering tidak sesuai dengan jumlah uang yang ditukarkan oleh penerima PKH karena pengelolaan masih selingkup yang bekerja di kantor wali nagari Tiumang bukan anggota PKH yang mengelola.

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Beras

No	Tanggapan terhadap Kwalitas Beras	Jumlah	Persentase
1	Bagus	0	0%
2	Sering tidak bagus	30	30%

3	Tidak bagus	0	0%
	Total	30	100

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Penerima PKH yaitu Nurtini, adalah:

“Kualitas beras yang di terima sering tidak bagus. Beras sering berbau jika dimasak bergetah seperti nasi basi dan rasanya kurang enak” (Nurtini, wawancara tanggal 21 Mei 2021).

Hasil wawancara dengan penerima PKH yang bernama Yurnalis adalah: “kualitas beras memang kurang, tetapi untuk kualitas PKH menurut saya sudah cukup bagus. Karana kami sudah terbiasa menkonsumsinya sehingga kami merasa tidak terlalu membermasalahkan kualitas PKH” (Yurnalis, wawancara tanggal 21Mai 2021)

Hasil wawancara dengan penerima PKH yang bernama ina adalah:

“Kualitas beras yang saya dapatkan kadang bagu kadang tidak bagus dan berwarna putih dan tidak berbau, sedangkan kualitas beras yang kurang bagus agak berbau, warnanya kuning bahkan berkutu” (Ina, wawancara tanggal 21 Mai 2021)

Hasil wawancara dengan penerima PKH yang bernama Sidas adalah :

“apabila beras PKH yang saya terima kualitasnya tidak bagus saya sering menggiling ulang ke tempat penggilingan agar baunya agak berkurang dan ketika saya tiadak menggilingnya saya menjual beras tersebut kepasar dan uang hasil beras tersebut saya belikan kepada beras yang bagus”.(Sidas, wawancara tanggal 21 Mei 2021).

Dari hasil dari wawancara 4 orang penerima PKH dapat disimpulkan bahwa kualitas beras yang diterima Rumah Tangga Miskin sering tidak bagus dan berbau, dan berwarna kuning, bahkan berkutu, karena kualitas beras yang diterima sering tidak bagus masyarakat melakukan berbagai cara agar kualitas beras menjadi bagus.

c. Tepat Jumlah

Tepat jumlah adalah tepat jumlah PKH yang di distribusikan kepada Rumah Tangga Miskin yaitu sebanyak uang Rp 110.000 yang ada di saldo ATM penerima PKH di ganti dengan beras dan telur 1 sak penuh perbulan kondisi ini terjadi karena PKH tidak hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin yang terdaftar dalam database, akan tetapi PKH dibagikan juga kepada masyarakat yang mampu yang terdaftar dalam database. Masyarakat hanya mendapatkan uang PKH 110.000 dan diganti dengan beras 5kg dan telur 1 sak penuh /KK perbulan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan penerima PKH yang bernama Rosmawati yaitu:

“beras dan telur yang kami terima dari waktu setiap bulannya hanya 5kg berasdan 1 sak telur satu bulannya. Kami menerima kadang satu bulan kadang ada juga 2 bulan kadang juga tidak ada sama sekali, kadang kami menerima telat tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Kami berharap bantuan PKH yang kami terima kami dapatkan setiap bulannya. Karena apabila bantuan masih mengalami keterlambatan dalam pendistribusian, maka apa yang telah dilakukan pemerintah kurang bermakna untuk masyarakat kurang mampu”.(Rosmawati, wawancara tanggal 21 Mai 2021)

Dari hasil wawancara Rosmawati dipahami bahwa masyarakat kurang mampu di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya sangat mengharapkan bantuan PKH dan masyarakat juga berharap PKH yang mereka terima setiap bulanya tidak sekali dalam 2 bulan.

d. Tepat Harga

Tepat harga adalah tepatnya jumlah harga yang dibayarkan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang dalam penerimaan PKH sesuai dengan

harga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial yaitu sebesar 110.000/KK yang ditukarkan di E-warung.

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ismaini sebagai penerima PKH adalah:

“ harga beras dan telur yang kami terima sama dengan uang yang kami tukarkan yaitu Rp 110.000 bersama dengan beras 5kg dan telur 1 sak penuh”. (Ismaini, wawancara tanggal 21 Mei 2021)

e. Tepat Waktu

Tepat waktu adalah tepatnya waktu pendistribusian PKH kepada Rumah Tangga Miskin. Seluruh RTM penerima Program Keluarga Harapan menyatakan bahwa waktu pendistribusian PKH tidak tepat waktu, ketidak tepatan karena adanya masyarakat yang penerima PKH tidak menerima perbulan karena tidak ada saldo di ATM penerima PKH maka dia menerima 2 bulan sekali karena tidak dikirimnya dari pusat. Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Yusril sebagai Kepala jorong Nagari Tiumang adalah:

“waktu pendistribusian PKH kepada masyarakat yang menerima PKH tidak beraturan. Karena adanya PKH datang dari pusat tidak tepat waktu yang disebabkan adanya masyarakat yang telah menjemput PKH teah mengeluarkan biaya tetapi saldo di ATM mereka belum ada, maka belum bisa ditukarkan dengan beras dan telur. Hal itulah menyebabkan PKH sering terlambat di distribusikan kepada penerima PKH”(Yusril, wawancara pada tanggal 21 Mei 2021)

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala jorong Nagari Tiumang membuktikan keterlambatan pendistribusian PKH adalah karena adanya yang belum dikirimnya dari pusat dan kepala jorong berharap tidak adanya keterlambatan lagi dari pusat. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan penerima PKH yang bernama Mulyanis yaitu:

“waktu pendistribusian sering terlambat dan juga tidak beraturan. Padahal saya sangat membutuhkan bantuan PKH dan saya berharap untuk kedepannya bantuan dapat distribusikan dengan baik dan tepat waktu” (Mulyanis, wawancara tanggal 21 Mai 2021)

Dari hasil wawancara dengan Mulyanis dapat di simpulkan bahwa pendistribusian PKH sering terlambat hal itu di sebabkan dana yang mengalami keterlambatan dari pusat.

f. Tepat Administrasi

Tepat administrasi adalah tepatnya administrasi secara tepat dan benar dalam pendistribusian PKH. Administrasi yang dilakukan di Nagari Tiumang adalah dengan cara Rumah Tangga Miskin membawa kartu ke tempat yang disediakan pemerintah yaitu E-warung maka masyarakat bisa menukarkan uang yang ada dalam bentuk barang yang berupa beras dan telur sesuai dengan harga yang ada di ATM penerima PKH.

Dari hasil wawancara dengan kepala jorong Nagari Tiumang membuktikan bahwa administrasi yang telah terjadi di Nagari Tiumang masih kurang tepat karena masih terdapat masyarakat yang dikatakan mampu dalam penerimaan (PKH) tersebut dan ada dikatakan tidak mampu tidak menerima (PKH) Program Keluarga Harapan tersebut.

Jadi dari indikator efektifitas dan hasil wawancara dari Penerima Manfaat PKH dapat penulis simpulkan dari keseluruhan indikator, Efektifitas Program keluarga Harapan pada Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya ada 6 indikator adalah tidak efektif dimana 4 dari 6 indikator yang ditetapkan tidak terpenuhi, 4 indikator yang tidak terpenuhi itu adalah tepat sasaran penerima mamfaat, tepat kualitas, tepat administrasi, tepat waktu dan ada 2 indikator yang telah tepenuhi yaitu tepat harga dan tepat jumlah jadi efektifitas program keluarga harapan (PKH) di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang

Kabupaten Dharmasraya belum terlaksana secara efektif, belum efektifnya karena ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan penerima PKH, selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh anggota PKH menjadi tepat guna tidak sesuai dengan tujuan PKH itu sendiri.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Efektifitas PKH Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya

Dalam Islam pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang dipimpin dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Dalam islam untuk mengentaskan kemiskinan agar terwujudnya kesejahteraan, program perlindungan sosial harus berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari kezholiman. Dalam penerapannya PKH dalam upaya dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1) Keadilan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Ia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya di arahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya mendapat mamfaat dari padanya secara adli dan baik. Dalam ajaran islam adil didefenisikan sebagai “ tidak menzalimi dan tidak dizalimi” tanpa keadilan mausia akan berkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.(Muhammad Arif,2018:95)

Islam menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk bersikap adil, baik kepada Allah SWT, diri sendiri maupun kepada orang lain. Pada penelitian ini, PKH di nagari Tiumang telah menjunjung tinggi keadilan, sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala jorong Nagari Tiumang mengenai data yang diterima PKH tidak di dasarkan pemelihan sendiri tetapi sudah di data oleh BPS.

2) Tanggung Jawab

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang baik dan benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Tidak terkecuali pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah yang dipimpinnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Muddatsir ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya:”Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa setiap diri mempunyai tanggung jawab, terlebih lagi seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan Negara yang dipimpinnya.

Dalam penerapannya, PKH di Nagari Tiumang belum adanya tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, RTM yang penerima bantuan berdasarkan data-data lama tanpa adanya pembaruan yang dilakukan oleh BPS. Sehingga masyarakat yang sudah ada peralihan status sosialnya namun masih mendapatkan bantuan. Jadi dalam hal ini penerapan PKH belum tealisai dengan

baik karena belum adanya tanggung jawab secara penuh dari pengelola program sosial terhadap masyarakat.

3) Takaful (Jaminan Sosial)

Jaminan sosial dalam Islam merupakan sebuah kewajiban yang telah disyariatkan Allah kepada setiap orang yang memiliki kelebihan harta, untuk menafkahkan kepada orang yang membutuhkan.

Islam telah menugaskan Negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Negara menunaikan kewajiban ini dalam bentuk *pertama* Negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri. Namun, ketika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri atau ketika ada keadaan khusus dimana Negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua. Dalam hal ini bentuk *kedua*, adalah Negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya. (Nairul Edwin, 2017:241)

Berdasarkan kondisi ini, penerapan PKH di Nagari Tiumang dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang kurang berlaku adil dan bertanggung jawab, PKH hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Karena masih ditemukan ketidak tepatan sasaran dalam menentukan anggota penerima bantuan dan tidak sesuai waktu penerimaan yang

saharusnya dengan yang terjadi di lapangan sehingga PKH kurang efektif.

3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang

a. Sosialisasi

Tidak semua masyarakat mengetahui bahwa adanya bantuan PKH dan informasinya tidak sampai kepada masyarakat karena masih ada masyarakat yang tidak tau adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi PKH.

Dari hasil wawancara dengan pendamping PKH nagari Tiumang yaitu Ibu suci diketahui sosialisasi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH yang dilakukan masih kurang baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh pendamping PKH nagari Tiumang.

“memang sosialisai kepada stakeholder di tingkat bawah masih belum baik sehingga belum terciptanya pemahaman yang sama kepada pihak Nagari tentang mamfaat dan fungsi PKH sehingga masih mempermasalahkan data PKH tidak sesuai dengan data masyarakat miskin yang ada di Nagari Tiumang”(Ibu Suci, wawancara pada tanggal 23 Mai 2021)

Dari hasil wawancara dengan pendamping PKH Nagari Tiumang diketahui bahwa sosialisasi ke berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH yang dilakukan masih kurang baik.

b. Aspek psikologi Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam bentuk memberikan data yang Rill karena ada beberapa masyarakat yang merasa malu menyatakan dirinya dalam kategori miskin

Kelemahan

c. Sarana dan Prasarana Karena Lemahnya Manajemen

Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Nagari Tiumang harus disediakan sarana dan prasarana salah satunya untuk kebutuhan sosialisasi dan yang lainnya. Dalam hal sosialisasi dan yang lainnya. Dalam hal sosialisasi membutuhkan tempat atau ruangan untuk melakukan hal tersebut. Bukannya hanya tempat sosialisasi tapi juga tempat fasilitas secretariat untuk pedamping PKH.

Hasil wawancara dengan pedamping PKH Nagari Tiumang masih kurangnya fasilitas yang disediakan oleh nagari dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung proses pelaksanaan PKH di Nagari Tiumang. Sebagaiman yang disampaikan oleh pedamping PKH sebagai berikut:

“untuk melaksanakan PKH di Nagari Tiumang kita juga mengadakan sosialisasi dan pertemuan bulanan peserta PKH, tetapi tidak adanya fasilitas yang mendukung atau tidak tersedianya tempat untuk melaksanakan sosialisasi dan pertemuan bulanan ini menjadikan pertemuan bulanan berpindah-pindah setiap bulannya. Dengan hal demikian kadang membuat peserta bingung dimana pertemuan yang akan di laksanakan”(Ibu Suci, wawancara tanggal 23 Mai 2021)

Hari dari wawancara pefdamping PKH di simpulkan bahwa untuk mendukung terlaksananya PKH di Nagari Tiumang dengan baik maka perlu sosialisasi dan pertemuan kelompok dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah penulis lakukan, gerkait dengan pelaksanaan efektifitas program keluarga harapan (PKH) ditinjau dari ekonomi islam di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya yaitu :

1. Efektifitas program keluarga harapan pada Nagari tiumang Kecamatan Tiumang secara keseluruhan berdasarkan rata-rata indicator 6T adalah tidak efektif dimana 4T dari 6T indikator yang di tetapkan tidak terpenuhi, 4T indikator yang tidak terpenuhi itu adalah tepat sasaran penerima mamfaat, tepat kualitas, tepat administrasi, tepat waktu dan 2T indikator yang telah di penuhi yaitu tepat harga dan tepat administrasi. Efektifitas program keluarga harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Tiumang . PKH di Nagari Tiumang terlaksana dari tahun 2016-2020 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Nagari Tiumang belum terlaksana secara efektif. Belum efektifnya program ini dikarenakan masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan peserta PKH selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta PKH menjadi tidak tepat guna sesuai dengan tujuan PKH, sehingga PKH belum dapat mengurangi atau mengentaskan kemiskinan yang ada di Nagari Tiumang.
2. Program keluarga harapan (PKH) dalam pandangan islam dapat dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi islam yaitu keadilan, sejalan dengan teori keadilan di distribusi kekayaan dalam islam, dalam artian sejalan seperti zakat, wakaf dan sedekah dalam islam. tanggung jawab, dan takaful (jaminan sosial). Dalam penerapannya PKH masih sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan baik masyarakat

dan pemerintah. Sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab kurang terlaksana dengan baik karena masih ditemukannya dari aspek prioritas alokasi ketidak tepatan sasaran dalam menentukan peserta penerima PKH di nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya.

3. Faktor-faktor penghambatnya Dan Kendala pelaksanaan Program keluarga harapan yang mana sosialisasi PKH lebih gencar lagi sehingga masyarakat Nagari Tiumang mengetahui bahwa ada bantuan Program Keluarga Harapan untuk masyarakat miskin. Dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan perhatian lebih dari pemerintah dalam mengawasi pendistribusian Program Keluarga Harapan agar berjalan sesuai dengan yang di harapkan
2. Sebaiknya Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dan mengikutsertakan perwakilan dari Nagari Tiumang pada saat pendataan, Karena pihak Jorong Nagari lebih mengetahui kondisi perekonomian di wilayahnya
3. Hendaklah Pihak Nagari mengencarkan sosialisasi PKH kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bantuan PKH
4. Pemerintah diharapkan agar selalu memperbaharui data jumlah dan lokasi masyarakat miskin agar PKH yang disalurkan agar terjamin ketepatan sasaran penerimaan PKH.
5. Kepada pedamping PKH agar dapat melakukan pemantauan secara rutin terhadap penerima bantuan yang diberikan dan mengajak intansi yang terlibat
6. Kepada pihak nagari supaya ikut andil dalam melakukan sosialisasi program dan melaksanakan program ini dengan baik sehingga tepat sasaran.

7. Dalam pendistribusian sebaiknya tepat waktu disesuaikan sehingga masyarakat tidak banyak menunggu dalam pendistribusian dana tersebut.
8. Untuk masyarakat penerima PKH ini supaya mengikuti kewajiban mereka sebagai penerima bantuan, contohnya dalam pertemuan kelompok setiap bulannya. Masyarakat ikut andil dalam mensukseskan pelaksanaan PKH ini sendiri.

Daftar Pustaka

- Agung, kurniawan. (2005). *Tranformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Pembaruan.
- Ambar t. Dan rosidah. (2018). *Menajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ardito Bhinadi (2017). *Penanggulangan Kemiskinan Dan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Arikunto, S. (2007). *Prosedur Pnelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ekardo, Reward. (2014). *Ekeftivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Logan Hilir Punggasan Kecamatan Lingo Sari Paganti Kabupaten Pesisir Selatan*. Artikel pendidikan sosiologi sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan pgri sumatera barat padang.
- Ekardo,apando (2014). *Efektifitas program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentaskan Kemiskinan*.Vol 3 No 1.
- Hendrawan, Supratiko. (2011). *Ekonomi Nurani Dan Naluri*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- <https://luk.staf.ugm.ac.id/atur/sehat/uu-11-2009kesejahteraansosial.pdf>
- <https://www.kemensos.go.id/>. Diakses pada 1 desember 2020.
- Sholahuddin, M. (2007). *Asas-Asas Ekonomi Islam*, jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Mahardita, Hayuning. (2017). R. *Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Nagara Di Secretariat Dprd Proinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Mahmudi. (2005.) *Menajemen Kinerja Publik*. Yogyakarta: Upp Amp Ykpn.
- Makmur. (2011). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan mentri sosial RI. No.1 tahun 2018 tentang keluarga harapan.

- Rosmati. Dkk. (2011). *Program Penanggulangan Kemeskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Keminfo RI.
- Saagian, Sondang p. (2015). *Menajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sadono, (2006) Sukirno. *Ekonomi Pembangunan :Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*. Jakarta Prenada Media Group.
- Sedermayanti. (2009) *Sumber Daya Manjusia Dan Produktifitas Kerja*. Bandung . Penerbit Mandar Maju.
- TNP2K. Program Penanggulangan Kemiskinan. Di
<http://www.tpn2k.go.id/id/program/sekilas/>.
- TNP2K. *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019*. Edisi Juli 2019.
- Uha, Ismail Nawawi. (2012) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. CV. Dwiputra Pustaka Jaya.

Alat Pengumpul Data (APD)

Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Tiumang Kec.Tiumang Kab. Dharmasraya)

A. Wawancara dengan Peserta PKH Desa Tiumang

- 1) Dari tahun berapa ibu mendapatkan bantuan program keluarga harapan(PKH)?
- 2) Termasuk dalam kriteria komponen apa yang ibu dapatkan?
- 3) Berapalah besaran bantuan yang ibu dapatkan?
- 4) Apakah tahap pencairan dana dilakukan tepat waktu?
- 5) Apakah sebelum pelaksanaan PKH diadakan sosialisasi oleh petugas atau pejabat desa?
- 6) Apakah dana yang ibu terima ibu gunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan?
- 7) Apakah dana yang ibu terima ibu gunakan untuk kebutuhan lainnya selain pendidikan dan kesehatan?
- 8) Apakah dengan adanya PKH kualitas pendidikan dan kesehatan meningkat?
- 9) Apakah program keluarga harapan mensejahterakan keluarga harapan?
- 10) Apakah ada mamfaat yang ibuk rasakan setelah menjadi anggota PKH ?
- 11) Apakah menurut ibuk program keluarga harapan perlu dilanjutkan ?
- 12) Apakah sudah efektif program keluarga harapan untuk meningkatkan ekonomi ibuk ?
- 13) Siapa yang mengawasi atau mengontrol proses penerimaan bantuan program keluarga harapan di Nagari Tiumang?
- 14) Bagaimana proses pendampingan dilakukan ?
- 15) Kapan ibuk mulai menjadi anggota PKH ? sejauh apa peningkatan dalam perekonomian ibuk?
- 16) Dimana ibuk mencairkan bantuan dari program keluarga harapan ?

- 17) Siapa yang mendampingi ibuk sejak menjadi anggota dari program keluarga harapan ?
- 18) Apa saja yang telah ibuk lakukan untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga sejak menjadi anggota PKH?
- 19) Mengapa ibuk belum bisa meningkatkan perekonomian keluarga ?
- 20) Kendala apa yang ibuk rasakan atau yang harus di tigtatkan dalam program keluarga harapan ini ?

B. Wawancara dengan Pendamping PKH

1. Sejak kapan PKH dilaksanakan di Nagari Tiumang ?
2. Apakah ibuk mengadakan pertemuan secara rutin ?
3. Apakah ibuk memberikan penjelasan tentang program keluarga harapan, hak, dan kewajiban menjadi peserta PKH ?
4. Apa yang dilakukan jika peserta PKH sudah tidak memenuhi syarat atau kriteria komponen PKH ?
5. Apakah program keluarga harapan (PKH) di nagari Tiumang sudah berjalan efektif ?
6. Bagaimana penyaluran bantuan program keluarga harapan sampai kemasyarakat dalam membantu meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin di Nagari Tiumang ?
7. Kapan pertemuan kelompok dilakukan ?
8. Siapa tokoh yang menjamin ke efektifitasan program keluarga harapan di nagari Tiumang ?
9. Mengapa di dalam pelaksanaan program keluarga harapan masih banyak di jumpai kendala ?
10. Kendala apa saja yang menghalangi ke efektifitasan program keluarga harapan yang ada di nagari Tiumang?
11. Bagaimana cara menyikapi kendala-kendala yang ada?
12. Dimana pertemuan kelompok dilakukan ?

13. Apa dengan adanya program keluarga harapan keluarga penerima mamfaat (KPM) menjadi peduli terhadap kesehatan keluarganya, pendidikannya ?
14. Apa yang dilakukan pendamping sehingga KPM dapat merubah perilaku yang baik ?
15. Hal-hal apa saja yang dilakukan pedamping sehingga program berjalan dengan lancar ?

C. Wawancara dengan Bapak Wali Nagari Tiumang :

1. Bagaimana prosedur pengusulan calon penerima PKH ?
2. Apakah menurut anda Program Keluarga Harapan (PKH) telah tepat sasaran bagi penerima bantuan ?

Lampiran

Foto wawancara dengan Kepala Jorong Nagari Tiumang



Lampiran 2

Foto wawancara dengan Masyarakat penerima Program Keluarga harapan (PKH)









Foto Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan



Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian (LP2M Batusangkar)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp.: (0752) 71150, Ext 135, Fax: (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: ipgm@iainbatusangkar.ac.id

27 April 2021

Nomor : B- 0279/In.27/L.I/TL.00/04/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Dharmasraya
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya
Sungai Dareh

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Tina Regina Sari / 1730402080
Tempat/Tanggal Lahir : Tiumang, 17 Juli 1999
Kartu Identitas : KTP: 1310015601990002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jorong Tiumang Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya

akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau dari Ekonomi Islam**
Lokasi : Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya
Waktu : 28 April 2021 s.d 28 Mei 2021
Dosen Pembimbing 1 : Gampito. SE., M.Si
2 : -

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan surat izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Muhammad Fazis, M. Pd

Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.

Surat Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dharmasraya

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Lintas Sumatera Km. 5 Sibakau Provinsi Sumatera Barat (27573) Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email: idpmtspkabupatendharmasraya@gmail.com Website: www.dharmasrayakab.go.id	
REKOMENDASI PENELITIAN	
Nomor : 503/93/PELITIAN/DFMPTSP/V-2021	
Dasar 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipatan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2020 4. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/143/KPTS-BUP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya 5. Surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUANGKAR Nomor : B-0279/ta.27/L.1/TL.00/04/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Permohonan Penelitian dan TINA REGINA SARI	Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan Tertib Administrasi dan Pelaksanaan Penelitian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, diperlukan upaya pengendalian Penelitian. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Rekomendasi Penelitian.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya memberikan Rekomendasi kepada : Nama : Alamat : Judul : Tujuan : Lokasi : Waktu : Program Studi : Status Anggota : Asal Kelembagaan :	TINA REGINA SARI Jorong Tiurang Nagari Tiurang Kecamatan Tiurang Kabupaten Dharmasraya "EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM" Mendapatkan Data NAGARI TIURANG 28 April 2021 s/d 28 Mei 2021 EKONOMI SYARIAH Perseorangan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUANGKAR
Untuk melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Penelitian harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang disampaikan. 2. Peneliti harus melapor kepada pemerintah setempat serta mematuhi Norma Adat/Budaya dan Ketentuan yang berlaku. 3. Rekomendasi Penelitian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, dan apabila pelaksanaannya melebihi dari jangka waktu yang ditentukan, maka peneliti wajib mengajukan perpanjangan Rekomendasi dengan menyertakan laporan hasil penelitian sebelumnya. 4. Memberikan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cc. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Paling lama 6 (enam) bulan setelah Penelitian dilaksanakan. 5. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi penelitian (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).	
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.	
	Pulau Panjang, 6 Mei 2021 a.n Bupati Dharmasraya Plt. Kepala Dinas  NALDI, S.STP, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19820411 200012 1 002